

Pendidikan Rakyat dalam Organisasi-organisasi Non-Pemerintah: Pendidikan untuk Mobilisasi Sosial?

Salomon MAGENDZO

Salomon Magendzo mengontraskan sistem pendidikan yang disponsori pemerintah Chili dengan "pendidikan rakyat", suatu gerakan pendidikan berbasis masyarakat yang bercita-cita mengembangkan kemampuan orang-orang miskin dan mengikutsertakan mereka dalam transformasi masyarakat. Untuk tujuan ini PIIE (*the Interdisciplinary Program for Research in Education* atau Program Riset Interdisipliner dalam Bidang Pendidikan) organisasi non-pemerintah yang berafiliasi pada Gereja Katolik Chili, berdaya upaya menciptakan perubahan sosial dilandasi riset atas masalah-masalah pendidikan dan usaha promosi pembangunan pendidikan. Dalam tulisan ini Magendzo memaparkan beberapa proyek pendidikan rakyat yang dikembangkan oleh PIIE menangani masalah-masalah khusus yang dihadapi kelompok-kelompok dan membantu mereka berpartisipasi dalam pembangunan sosial dan pendidikan secara komprehensif.

DI Republik Chili pemerintah mendukung peranan politis dan strategis yang sentral dalam pembangunan sosial dan memegang kekuasaan untuk menentukan kesejahteraan umum. Sebagai akibat dari kebijakan yang sedemikian ini adalah berlakunya sistem pendidikan yang ha-

nya mempunyai hasil minimal bagi orang-orang miskin agar mampu berpartisipasi dalam kehidupan politik dan ekonomi. Padahal, di negara ini penduduk miskin sekurang-kurangnya merupakan 40% dari bangsa Chili.¹

Sejak permulaan sistem pendidikan senantiasa mempunyai fungsi pokok membina rakyat untuk kegiatan yang produktif. Akan

Alih bahasa oleh Sunarto nDaru Mursito dari karangan Salomon MAGENDZO, "Popular Education in Nongovernmental Organizations: Education for Social Mobilization?" setelah diterjemahkan dari bahasa Spanyol oleh Cristina Cardalda dalam *Harvard Educational Review* vol. 60, No. 1, 1990.

¹Lihat misalnya, Briones, Egana, Magendzo, dan Jara (1984).

tetapi karena ia memiliki akar-akarnya dalam nilai-nilai kelas menengah, maka sistem politik telah mengarahkan pendidikan menjadi sarana yang utama untuk pengembangan ideologi mobilitas sosial, dan dalam prosesnya telah menjejali sekolah-sekolah dengan ideologi nilai-nilai kelas menengah ini.

Mobilitas sosial dapat didefinisikan sebagai proses yang dilalui orang-orang atau kelompok-kelompok untuk menaiki tangga sosial menuju kelas-kelas yang lebih tinggi. Umpamanya, seseorang pada tingkat magang bisa mencita-citakan, melalui pendidikan, menjadi seorang manajer perusahaan. Ideologi ini telah benar-benar demikian dire-sapi oleh masyarakat Chili sehingga tuntutan-tuntutan dan aspirasi-aspirasi dirasakan secara luas, tanpa memperhatikan apakah peluang atau kesempatan mobilitas sosial itu mungkin ada.²

Dengan melaksanakan satu kurikulum yang sama di sekolah-sekolah, sistem pendidikan menciptakan ilusi persamaan kesempatan dan menjadi alat yang efisien untuk menghapus keanekaragaman. Meskipun dari luar masyarakat Chili mungkin tampak homogen, dalam kenyataannya ada perbedaan di dalam dan di antara kelompok-kelompok sosial. Rakyat yang bermigrasi dari desa ke kota, misalnya, berbeda dalam perilaku, kepentingan, kebudayaan, dan tradisi dari rakyat yang sudah berada di lingkungan perkotaan. Perbedaan ini tidak diperhitungkan dalam sistem pendidikan, yang memberlakukan jenis persekolahan seragam bagi seluruh rakyat, tanpa mengakui kebutuhan dan tuntutan kelompok-kelompok khusus.

Sistem pendidikan Chili yang disentralisasi menetapkan kebudayaan pihak yang

²Labarca (1987).

dominan ke atas orang-orang muda. Selanjutnya, media massa menghasilkan akibat-akibat yang opresif, karena dalam media massa kebudayaan dipahami melulu sebagai sarana manipulasi dan promosi konsumsi. Peranan media massa telah merusak aktivisme sosial jenis mana pun. Oleh karena itu, pendidikan untuk kepentingan aktivisme sosial memerlukan penggalakan humanisasi dan individualisasi hubungan-hubungan sosial.³

Dalam rangka mobilisasi sosial pendidikan telah dipahami oleh pihak-pihak yang melaksanakannya sebagai sinonim dari pendidikan rakyat.⁴ Ini berurusan dengan usaha memampukan para warga negara untuk memainkan peranan yang menentukan dalam pembangunan masyarakat demokratis yang adil. Seperti halnya didefinisikan sejak tahun 1973 oleh kalangan organisasi non-pemerintah (NGO) yang terlibat dalam program pendidikan rakyat, maka tujuan pokok dari jenis pendidikan ini adalah "pembangunan kembali struktur sosial". Pembangunan kembali ini terjadi di luar bidang kegiatan pemerintah dan di luar batas-batas praktek politik yang mapan. Ia mencoba menyusun kaitan-kaitan di antara individu-individu, kelompok-kelompok, dan organisasi-organisasi berbasis masyarakat demi

³Bengoa (1988).

⁴Peristilahan "pendidikan untuk aktivisme sosial" dan "pendidikan untuk mobilisasi sosial" mengacu pada partisipasi aktif rakyat miskin di Chili dalam pembangunan kebudayaan dan politik negeri mereka. Istilah "pendidikan rakyat" juga digunakan oleh para pendidik masyarakat untuk mengartikan pendidikan yang mengembangkan partisipasi aktif rakyat berpendapatan rendah dalam pembangunan pendidikan, kebudayaan, dan politik Chili. Program "pendidikan rakyat" adalah program yang dikembangkan di daerah-daerah miskin Chili.

mengatasi fragmentasi sosial dan kurangnya keterpaduan.⁵

Tujuan pendidikan rakyat itu didasarkan pada gagasan membangun masyarakat yang partisipatoris dan demokratis. Dalam hal ini pendidikan rakyat dilawankan dengan "pendidikan untuk semua", jenis pendidikan yang oleh elite nasional diberlakukan untuk semua kelompok. Sebagai pengganti, pendidikan rakyat ini membutuhkan metode pendidikan yang secara radikal meragukan praktek-praktek otoriter dan penyaluran pengetahuan secara mekanis yang merupakan ciri khas pedagogi tradisional. Dia mengutamakan dialog, belajar dalam kelompok, dan menilai pengalaman para partisipan sebagai dasar untuk pelajaran dan pengetahuan yang lebih lanjut. Pengajarnya pun yang berlaku sebagai fasilitator dalam proses pendidikan kolektif, adalah seseorang yang mampu mempertanyakan secara kritis persepsi yang berbeda-beda tentang kenyataan dan tradisi, dan mampu menyumbangkan perumusan pengetahuan baru menyangkut masalah masyarakat miskin dan pelaksanaan kebijakan yang diinginkan oleh kaum miskin.

Tujuan mobilitas sosial dan mobilisasi sosial secara jelas dipertentangkan satu sama lain. Tujuan mobilitas sosial bagi perorangan adalah untuk beralih dari kelas sosial yang satu menuju kelas sosial yang lain. Dalam proses ini orang kadang-kadang kehilangan perasaan akan identitasnya, seperti halnya perasaan termasuk suatu kelompok atau kelas tertentu. Sedangkan, tujuan dari mobilisasi sosial adalah untuk memperkuat nilai-nilai kelompok dan meningkatkan rasa identitas sebagaimana hal-hal ini berkaitan dengan dinamika perorangan dalam suatu kelompok.

⁵Bengoa (1988).

Secara historis kelompok-kelompok berbasis masyarakat di Chili telah mempromosikan program untuk reorganisasi dan pembangunan sosial melalui upaya mempengaruhi pelaksanaan pendidikan. Akan tetapi, usaha-usaha mereka terbatas dan telah dimarginalkan karena bersifat lokal dan kurang didukung pemerintah, meskipun demikian usaha-usaha tersebut bernilai.

Tulisan ini memaparkan hasil kerja organisasi-organisasi non-pemerintah yang telah menyumbang untuk mobilisasi sosial, khususnya berfokus pada kegiatan-kegiatan yang disponsori oleh PIIE (*Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educacion* atau Program Riset Interdisipliner dalam Bidang Pendidikan), suatu organisasi yang mempromosikan proses-proses partisipatoris dengan meningkatkan kualitas kehidupan keluarga, menguatkan organisasi-organisasi masyarakat, dan pembangunan kembali struktur sosial Chili.⁶

Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educacion (PIIE)

PIIE adalah organisasi non-pemerintah yang didirikan dalam tahun 1971 sebagai suatu unit akademis dari Universitas Katolik di Santiago, Chili. Pada tahun 1977 sebagai akibat perbedaan politik, program-programnya dibatalkan oleh universitas. Akan tetapi para anggotanya memutuskan melanjutkan kerja mereka sebagai suatu kelompok, dan mereka berafiliasi pada Akademi Humanisme Kristiani, suatu badan ciptaan Gereja Katolik untuk menghimpun kelompok-kelompok yang menghadapi kesulitan karena berselisih paham dengan pemerintah.

⁶Wawancara dengan Zuniga (1986).

Sejak tahun 1977 PIIE mengembangkan proyek pendidikan mengacu kebutuhan kelompok-kelompok dan melanjutkan risetnya pada sistem pendidikan dan persekolahan yang standar. Sepanjang tahun-tahun ini PIIE telah meluaskan kegiatannya melampaui wilayah metropolitan memasuki propinsi-propinsi, khususnya memasuki daerah yang banyak mengalami kemerosotan ekonomi, sosial, dan budaya.

Tujuan PIIE adalah mengusahakan perubahan sosial dengan mengadakan riset pada problematik pendidikan dan mempromosikan pembangunan pendidikan. Untuk tujuan ini ia melakukan dukungan pada orang-orang atau kelompok-kelompok yang terlibat dalam perubahan sosial, dalam kegiatan seperti riset dan eksperimen. PIIE mengutamakan tiga bidang pokok pembangunan pendidikan: (1) sistem atau sub-sistem pendidikan; (2) pelaksanaan pendidikan di sekolah-sekolah atau program pendidikan non-formal; (3) para partisipan dan organisasi-organisasi yang terlibat dalam pendidikan.

Tujuan PIIE itu dicapai dengan cara: (1) pencarian paham atau pengetahuan dasar untuk kepentingan merumuskan kebijakan pendidikan; (2) pengembangan inovasi dan alternatif untuk pembangunan sosial dalam pelaksanaan pendidikan; dan (3) dukungan untuk pengembangan tenaga pendidikan berbasis masyarakat dengan memudahkan partisipasi dalam pembangunan sosial dan pendidikan. Ketiga upaya ini semuanya harus ada demi menunjang organisasi-organisasi dan tenaga-tenaga pendidikan berbasis masyarakat.

Selain itu, PIIE berdaya upaya mencari gagasan atau metode baru yang lebih disesuaikan dengan kenyataan dan kepentingan kelompok miskin. Proyek-proyek yang dida-

sarkan pada komitmen ini diungkapkan berikut ini.

Program Pendidikan Serikat Pekerja Petani

Program ini merupakan hasil kerjasama antara PIIE dan suatu konfederasi serikat pekerja, Serikat Petani dan Serikat Buruh. Tujuan program adalah membantu pengembangan pemimpin, dan untuk meningkatkan partisipasi para anggota kelompok dalam satuan-satuan pertanian dalam rangka menguatkan organisasi dan membuat mereka menjadi lebih terpadu. Dalam tahap pelaksanaan, proyek menggunakan pendekatan kelompok dan pendekatan partisipatoris dan secara khusus merancang materi-materi pendidikan. Proyek mengutamakan dan menggalakkan penciptaan serta pengembangan tim-tim di dalam kesatuan yang secara progresif bertanggung jawab mengendalikan program-program pendidikan.

Pusat-pusat Pendidikan

Proyek ini bertujuan mengadakan pusat pendidikan dalam sebuah masyarakat marginal di desa Puente Alto. Dengan dukungan PIIE masyarakat ini mengutarakan pemikiran mereka tentang pendidikan. Anggota-anggota kelompok mulai mempertimbangkan kebutuhan mereka dan secara kolektif berpartisipasi dalam pelaksanaan rangkaian tindakan. Sedemikian jauh PIIE telah bekerja sama dengan pemuda-pemudi yang sedang mengembangkan kegiatan rekreasi dengan anak-anak. PIIE juga telah bekerja sama dengan para wanita yang menangani suatu bengkel produksi, sebuah organisasi ekonomi berbasis masyarakat yang menye-

lenggarakan latihan dalam memproduksi barang seperti layar atau pakaian dan mengajarkan unsur-unsur pokok administrasi serta pemasaran. PIIE juga telah mengadakan masa pendidikan bagi para pemimpin masyarakat, yang akan diuraikan kemudian. Tujuan proyek ini adalah mempersiapkan sumber-sumber daya pendidikan yang mengacu pada kebutuhan masyarakat.

Dukungan Pendidikan dan Metodologi Bagi Tim-tim Teknis Pedesaan

Usaha ini merupakan suatu proyek kerjasama yang dimulai pada tahun 1985 antara PIIE dan Masyarakat Profesi Pertanian. Masyarakat Pertanian mengorganisasikan berbagai tim teknis yang bekerja dengan organisasi-organisasi petani. Kepada organisasi ini ia memberi nasihat keuangan dan bantuan teknis.

Proyek ini dikerjakan di Chili Selatan dan Tengah. Dengan menekankan segi edukasional bantuan teknis, PIIE membantu tenaga profesional dan teknisi pertanian dalam penggunaan teknik pendidikan rakyat. Seminar-seminar dan kelompok-kelompok pendukung di lapangan merupakan bagian penting dari proyek, seperti halnya kerja bersama yang dibentuk untuk pembuatan materi-materi pendidikan.

Dukungan Bagi Petani-petani Muda

Sebagai suatu proyek kerjasama di antara Dewan Pendidikan orang-orang dewasa Amerika Latin, Masyarakat Pendukung Pengembangan Petani, "Pehuenche," dan PIIE, proyek ini dilaksanakan oleh tim-tim petani muda di daerah Talca dan Melipilla, dekat kota Santiago. Tujuannya adalah me-

ngangkat identitas para petani muda melalui masa penyiapan teknis dan sosial yang didasarkan pada pengalaman mereka sendiri. Kegiatan pendidikan membantu petani-petani muda itu menilai dan mempertanyakan kenyataan sosial mereka sendiri dan memungkinkan mereka memikirkan tindakan yang perlu diambil.

Proyek untuk Pengakuan dan Pengembangan Pendidikan Rakyat pada Kaum Profesional

Bermodelkan proyek PIIE yang sukses pada kaum profesional dan para teknisi pertanian, program ini ditujukan bagi orang-orang profesi yang merupakan anggota lembaga, perserikatan, atau organisasi kebudayaan yang bekerja di dalam kelompok-kelompok orang miskin. Falsafah program didasarkan pada keyakinan bahwa orang perlu mendasarkan kegiatan pendidikan mereka sendiri atas rasa penghargaan dan pengakuan pada pengetahuan orang lain, pada hubungan antarpribadi yang demokratis, dan pada pengembangan kesadaran kritis. Program berlangsung selama suatu tahun akademis.

Suatu program serupa, yang bernama Pendidikan Rakyat untuk Profesi Kesehatan, baru-baru ini juga ditujukan pada kaum profesional yang bekerja dalam sektor pemeliharaan kesehatan. Di Chili para anggota tim-tim perawatan kesehatan telah bekerja di klinik-klinik rakyat di luar pelayanan kesehatan pemerintah. Tim-tim ini mencoba mengaitkan kebutuhan dasar rakyat dengan permasalahan kesehatan yang ada pada sektor-sektor terkebelakang. Meskipun berpengetahuan luas dalam bidang keahlian mereka, namun tenaga-tenaga profesional perawatan kesehatan tidak diajarkan untuk

memahami baik kondisi sosial maupun keadaan aneh orang-orang yang hidup dalam lingkungan marginal, dan mereka pun tidak mempunyai latar-belakang pendidikan yang mengarahkan pendidikan menuju tindakan. Pada kenyataannya, kaum profesional perawat kesehatan yang bekerja di lingkungan marginal mengakui bahwa pendidikan universitas telah menyiapkan mereka untuk memecahkan permasalahan masyarakat elite Chili daripada masyarakat miskinnya. Sekalipun demikian, melalui program itu para profesional perawatan kesehatan belajar mengenai kebudayaan rakyat dan metode pendidikan yang dapat membantu mereka mengintegrasikan praktek profesi mereka dengan kegiatan perawatan primer yang memupuk perkembangan sosial dan menguntungkan masyarakat terbelakang.

Program Tempat-tempat Belajar

Program ini dimulai oleh PIIE pada tahun 1977 untuk menolong anak-anak di lingkungan-lingkungan berpendapatan rendah yang mengalami kesulitan pendidikan di sekolah sebagai akibat tidak meratanya kesempatan pendidikan, suatu permasalahan yang gawat di Chili. Program didasarkan pada asumsi bahwa kelompok-kelompok mempunyai sumber-sumber daya pendidikan untuk melaksanakan tugas untuk proses perkembangan dan kemajuan kolektif. Selama sepuluh tahun program berlangsung, maka dalam tahun 1988 sepuluh ribu anak mendapatkan manfaat dari pelayanannya.

Program Bengkel Kepemimpinan

Program ini dimulai pada tahun 1981 sebagai proyek bersama PIIE dan *Centro de*

Investigacion y Desarrollo de la Educacion (Pusat Riset dan Pengembangan Pendidikan) untuk membina para pemimpin organisasi-organisasi masyarakat. Program ini dipikirkan dalam konteks berkuasanya rezim otoriter di Chili sejak tahun 1973, dan tujuannya adalah mendukung, memperkuat, dan menggalang potensi organisasional kelompok-kelompok melalui metode pendidikan rakyat. Suatu penilaian dari tim yang disertai tugas, mengungkapkan serangkaian masalah sehubungan dengan kemunculan, pembinaan, dan pemfungsian organisasi-organisasi masyarakat ini. Program mengadakan bengkel-bengkel untuk menunjang pembinaan pemimpin kelompok dan menggalakkan pendidikan berbasis kelompok. Strategi ini ditujukan pada mereka yang telah menjadi pemimpin di dalam organisasi-organisasi khusus dan yang berkepentingan pula untuk mewujudkan rencanarencana mereka dalam jangka panjang. Pendidikan dilaksanakan selama lima bulan berdasarkan pengalaman mingguan mereka.

Dalam setiap tahap pendidikan pokok-pokok yang dibahas ditentukan oleh keprihatinan para partisan mengenai kelompok mereka. Dua masalah utama yang menjadi perhatian adalah: keadaan intern organisasi mereka masing-masing, dan hubungan organisasi dengan lingkungan sosial mereka.⁷

Mendasari dua programnya yang terakhir adalah gagasan memperkuat proses organisasi sosial sedemikian, sehingga orang-orang yang dimarginalkan mampu berpartisipasi dalam transformasi struktural masyarakat menuju masyarakat yang sepenuhnya menjamin hak-hak manusia dan warga negara.

⁷Vaccaro (1989).

Dua Pendekatan Pendidikan

Melalui kontak langsung dan berkesinambungan dengan kelompok-kelompok, organisasi-organisasi non-pemerintah (NGO) telah mengembangkan program yang bermaksud memecahkan masalah-masalah khusus. Program ini melibatkan banyak interaksi kompleks dari pelaku-pelaku eksternal (wakil-wakil NGO) dengan kelompok-kelompok, lembaga-lembaga, dan organisasi-organisasi di dalam masyarakat yang berkepentingan dengan pengembangan program. Kadang-kadang program diminta oleh anggota-anggota kelompok dan kadang-kadang program ditawarkan, tetapi paling sering program dihasilkan dari kontak-kontak antara NGO-NGO dan organisasi-organisasi yang mewakili kelompok. Secara bersama-sama NGO-NGO dan organisasi-organisasi menentukan program, ciri-ciri, dan tujuan-tujuannya.

Sekali tujuan telah dirumuskan, biasanya NGO lalu mencari dana dari lembaga-lembaga internasional. Lembaga-lembaga ini melakukan evaluasi yang luas tentang proyek yang akan disetujuinya. Setelah proyek disetujui, NGO biasanya mengatur dana-dana, dengan tingkat dana yang memenuhi lamanya kelangsungan program. Pada umumnya untuk mencapai tujuan proyek, sejumlah orang dari kelompok berkepentingan mengembangkan kemampuan untuk bekerja dan menerima bantuan teknis dari NGO.⁸

Para pendidik rakyat biasanya dibina dalam pendidikan persiapan, yang dikenal se-

⁸Mereka yang telah berpartisipasi dalam masa pembinaan pada umumnya dikenal sebagai "fasilitator", "pemantau", atau "pendidik rakyat". Dalam tulisan ini sebutan-sebutan tersebut dapat saling dipertukarkan.

bagai masa pembinaan dengan sponsornya PIIE. Di sini para profesional dan orang-orang dari kelompok yang berkepentingan bekerjasama menentukan kecakapan baku apa yang dibutuhkan kelompok khusus mereka, di samping bekerjasama mengembangkan kecakapan ini untuk dilaksanakan dalam kegiatan pendidikan. Proyek-proyek merupakan instrumen yang memungkinkan para pendidik rakyat, dalam komunikasi yang erat dengan pelaku-pelaku dari luar, memperoleh kecakapan khusus mengadakan intervensi dan menghasilkan jenis kegiatan baru dalam kelompok mereka.⁹

Proses ini secara khusus mengikuti dua pendekatan yang sangat berbeda: pendidikan sebagai kegiatan fungsional dan pendidikan sebagai proses. Pendekatan yang pertama berpusat pada efisiensi teknis dan hasil yang dapat diukur. Dalam pendekatan ini biasanya terpenuhinya serangkaian tujuan dipandang lebih penting daripada akibat yang timbul dari proyek itu. Dengan kata lain, "pendidikan fungsional" lebih memperhatikan hasil (*outcome*) dari proyek daripada proses pendidikan yang terlaksana dalam proyek. Misalnya, satu proyek dirancang untuk memperlihatkan kepada sekelompok petani suatu jenis bibit yang sebelumnya tidak pernah mereka lihat, tanpa mengusahakan kelompok petani itu mengerti kebutuhan dan kegunaan bibit tersebut bagi kelompok. Contoh yang lain adalah proyek menyiapkan para pendidik rakyat; sekali programnya selesai diorganisasikan, maka tidak diikuti tindak lanjut dan dukungan pada para pendidik itu.

Pendekatan kedua yang memandang pendidikan sebagai proses, bermaksud melampaui tujuan khusus sekali tujuan ini telah

⁹Vaccaro (1988).

tercapai, dan memikirkan kemungkinan lanjutan yang lebih luas dari proyek dan akibat-akibatnya pada organisasi komunitas. Pendekatan ini menekankan proses keikutsertaan dalam mengembangkan program. Ia mengusahakan keterlibatan aktif para partisipan dan penciptaan kelompok-kelompok komunitas. Pencapaian tujuan ini memerlukan seorang pendidik yang peka terhadap aspek-aspek yang seringkali dilalaikan pendekatan fungsionalis -- ringkasnya, aspek-aspek yang mampu menggalakkan mobilisasi sosial. Pendidik harus juga memperhatikan dan bertanggung jawab atas pembangunan kembali struktur sosial. Misalnya, dalam memperkenalkan jenis bibit baru kepada petani menurut pendekatan proses para pendidik akan mendiskusikan manfaat-manfaatnya bagi kelompok maupun arti pentingnya pengenalan teknologi baru untuk sektor-sektor pedesaan.

Dua pendekatan ini menampilkan cara pemikiran yang berlawanan tentang pendidikan. Pendekatan yang pertama menggunakan *dasar ketergantungan (dependency rationale)*, di dalam arti para partisipan mengikuti garis-garis pedoman proyek yang telah ditentukan. Ia menghasilkan pendidik-pendidik berbasis masyarakat yang tetap tinggal dalam batas-batas program khusus yang melatih mereka, artinya mereka meninggalkan komitmen mereka pada pendidikan sosial sekali mereka keluar dari bidang kegiatan proyek. Para pendidik ini pada umumnya mengikuti inisiatif-inisiatif yang telah diambil oleh orang lain daripada melaksanakan peranan yang lebih aktif dalam proses pendidikan.

Dalam pendekatan kedua yang mengikuti apa yang disebut *dasar mobilisasi sosial (social mobilization rationale)*, para partisipan tidak hanya berfokus pada kegiatan-

kegiatan proyek khusus mereka melainkan juga mengaitkannya dengan program-program yang lain. Mereka berpartisipasi dalam menyusun program dan memelihara komitmen mereka ketika bekerja dengan berbagai kelompok.

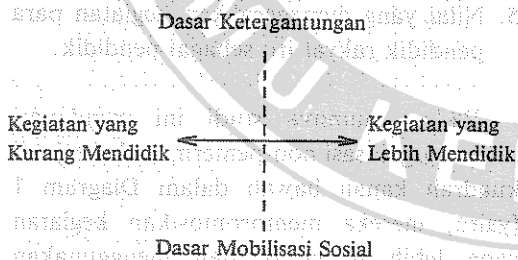
Dua pendekatan itu berbeda dalam ciri peranan pendidikan yang dilakukan partisipan, yaitu sekurang-kurangnya ada tiga perbedaan. Satu adalah peranan pendidik berbasis masyarakat yang melaksanakan kegiatan pendidikan komprehensif. Dalam peranan ini para pendidik rakyat menciptakan suatu "ruang kognitif" dengan secara hati-hati mengidentifikasi tujuan-tujuan, merencanakan kegiatan-kegiatan yang sesuai, dan mengembangkan partisipasi aktif para pelajar dalam proses pendidikan. Ruang kognitif ini dibatasi oleh kondisi yang memungkinkan pelajar mendapatkan pengetahuan dan menggunakannya dalam kehidupan *praxis* mereka. *Jenis kegiatan ini mempunyai akibat yang abadi.*

Peranan pendidikan kedua adalah menggunakan metode partisipatoris, tetapi tidak mempunyai hubungan riil dengan penciptaan ruang kognitif dalam arti yang lebih permanen. Misalnya, sekelompok orang dan seorang pendidik bekerjasama mengorganisasi suatu peristiwa budaya, tetapi mereka tidak mencoba mengorganisasi kelompok yang akan mengembangkan suatu pusat kebudayaan yang permanen; jelasnya jenis kegiatan ini hanya mempunyai akibat jangka pendek. Akhirnya, dalam peranan yang ketiga para pendidik rakyat melulu melakukan suatu kegiatan, tanpa berurusan dengan pendidikan yang sebenarnya. Contoh kegiatan demikian meliputi seperti mengumpulkan bahan pangan, membangun suatu pusat kebudayaan, menghidupkan kelompok, dan lain-lain.

Hubungan antara jenis peran kependidikan seorang pendidik rakyat dan dua pendekatan pendidikan yang telah dikemukakan adalah penting. Pendidik yang mengembangkan kegiatan pendidikan komprehensif berkemampuan mengerti peran-peran yang mendorong mobilisasi sosial di dalam kelompok. Para pendidik sedemikian ini memperhatikan dua hal baik proses belajarnya maupun kemungkinan-kemungkinan untuk perubahan sosial. Ide-ide mereka akan menempatkan mereka dalam kuadran kanan bawah Diagram 1. Sebaliknya, mereka yang melaksanakan kegiatan tanpa memperhatikan nilai pendidikannya akan menempatkan diri dalam kuadran kiri atas, di mana pendekatan ketergantungan dan peranan si aktivis bertemu. Gerakan sosial apa pun berurusan dengan beberapa sektor masyarakat, kalau menghendaki perubahan namun tanpa memandang perubahan ini sebagai bagian dari proses pendidikan, dapat ditempatkan dalam kuadran kiri bawah.

DIAGRAM 1

INTERAKSI ANTARA PENDEKATAN DAN JENIS KEGIATAN PENDIDIKAN



Adalah ciri suatu orientasi teknokratis mengarah pada kegiatan pendidikan yang mempunyai tujuan, rencana, dan bahkan metode partisipatoris yang khusus; tetapi pendekatan ketergantungan tampaknya

kuat. Hal ini terdapat dalam kuadran kanan atas.

Riset Atas Dampak Proyek-proyek Pendidikan

Riset merupakan kegiatan penting proyek-proyek PIIE untuk pendidikan rakyat, dan telah terwujud dalam berbagai bentuk dan pada tahap yang berbeda-beda. Pada umumnya ide untuk program-program tumbuh dari riset sebelumnya, dari kebutuhan kelompok-kelompok yang berpartisipasi, dan dari pengalaman tim-tim profesional. Selama fase perkembangan, para perancang proyek melakukan penaksiran kebutuhan-kebutuhan dan sistematisasi maupun evaluasi kegiatan-kegiatan, yang memungkinkan mereka melakukan perubahan berdasarkan informasi yang mereka peroleh.

Sekarang ini fokus PIIE adalah pada dampak sosial dari kegiatan pendidikan. Zuniga mengartikan hal ini sebagai akibat sosial yang dihasilkan oleh proyek khusus di dalam kelompok; di luar tujuannya semula.¹⁰ Dengan kata lain, hal-hal demikian ini ikut berperan: jenis organisasi yang diciptakan untuk menangani problem yang sudah ditentukan, hubungan antara organisasi ini dan lingkungan sosial, kemampuan merumuskan kepentingan-kepentingannya pada negara dan masyarakat, keterlibatan para pendidik dalam kegiatan kelompok lain selama proyek khusus, dan ciri politis proyek-proyek itu.

Memeriksa dampak proyek pendidikan rakyat yang disponsori oleh organisasi-organisasi non-pemerintah merupakan bidang riset yang penting. Sebuah studi¹¹

¹⁰Wawancara pribadi (1986).

¹¹Magendzo dan Medina (1988).

memperhatikan dampak tiga program pendidikan rakyat yang terkenal di Chili: *the Learning Workshops*, *Workshops for Community Leaders*, dan *We Joined! And Now?* Program yang terakhir ini dikembangkan pada tahun 1980 oleh CIDE (*Centro de Investigacion y Desarrollo de la Educacion*) atau Pusat Riset dan Pengembangan Pendidikan, dan merupakan "program pendidikan mengenai kehidupan seksualitas menyangkut pasangan-pasangan lingkungan berpendapatan rendah" yang merupakan anggota kesatuan paroki.¹² Sebagai pengalaman dalam pendidikan rakyat proyek membatasi diri menitikberatkan pada hubungan antara suami-isteri dan hubungan antara orangtua-anak.

Gagasan di balik studi ini adalah untuk menentukan bahwa organisasi non-pemerintah seperti PIIE dan CIDE tidak hanya menciptakan pendekatan pendidikan yang baru untuk memecahkan masalah-masalah khusus, melainkan juga mencapai tujuan-tujuan yang berikutnya dengan membina para pendidik di dalam kelompok-kelompok:

1. Pelibatan para pendidik berbasis kelompok di luar bidang program yang telah ditentukan;
2. Pemantapan kesinambungan penyiapan para pendidik baru, demikian sehingga pekerjaan mereka tidak berantakan atau hilang; dan

¹²Program ini meskipun bukan bagian PIIE dipilih karena CIDE dan PIIE dapat dipandang NGO-NGO yang paling representatif dalam bidang pendidikan di Chili. Program (*We Joined! And Now?*) adalah satu dari program yang paling luas menyiapkan para pendidik rakyat, dan keanggotaannya akan memungkinkan kita memperluas analisis tentang dampak mendidik dari NGO-NGO dalam kerangka kegiatan pendidikan rakyat.

3. Penekanan peranan mendidik dari partisipan dalam kerangka kegiatan pendidikan rakyat.

Sejumlah 130 orang mengambil bagian dalam studi ini: 74 orang dari program *the Learning Workshop*, 24 orang dari program *the Leaders Workshop*, dan 32 orang dari program *We Joined! And Now?* Suatu instrumen survei dirancang yang meliputi 38 pertanyaan khusus, dimaksudkan untuk mengumpulkan data-data berikut:

1. Jumlah para pendidik berbasis masyarakat yang terlibat dalam program atau kelompok sebelum dan sesudah masa penyiapan yang disponsori PIIE atau CIDE;
2. Jumlah dan jenis program atau kelompok di mana para pendidik berbasis masyarakat terlibat sebelum dan sesudah penyiapan mereka dalam proyek yang disponsori PIIE atau CIDE;
3. Tingkat otonomi para pendidik berbasis masyarakat yang dicapai setelah penyiapan;
4. Jenis peranan mendidik yang dimainkan para pendidik sebelum dan sesudah penyiapan mereka; dan
5. Nilai yang menggerakkan kegiatan para pendidik rakyat itu sebagai pendidik.

Pada umumnya studi ini mendapati bahwa organisasi non-pemerintah bekerja di kuadran kanan bawah dalam Diagram 1 (yaitu, mereka mempromosikan kegiatan yang lebih mendidik dan menggunakan alasan mobilisasi sosial) dan mempunyai peranan mendidik yang sungguh-sungguh dalam kelompok. Hasil riset menunjukkan bahwa upaya pendidikan yang dibawakan oleh tiga proyek khusus itu tidak mengungkapkan keterlibatan para partisipan dalam kegiatan-kegiatan kelompok. Data menun-

jukkan bahwa sebagian besar dari yang diwawancarai (60%) sudah aktif dalam program dan kelompok masyarakat sebelum mereka ikut serta dalam kegiatan-kegiatan penyiapan. Hasil ini sesuai dengan temuan dari studi kasus sebelumnya di mana masing-masing partisipan sudah terlibat dalam kelompok atau organisasi masyarakat sebelum mengikuti proyek yang disponsori oleh PIIE atau CIDE.¹³ Komitmen kerja dalam proyek sosial tampaknya bukan merupakan hasil dari keikutsertaan orang-orang ini dalam program pendidikan, melainkan lebih berasal dari pengalaman pribadi dan penghayatan hidup dalam kelompok.

Meskipun demikian, jumlah dan keanekaragaman program dan kelompok di mana mereka yang diwawancarai telah terlibat, tampaknya dipengaruhi oleh masa pendidikan dan keikutsertaan dalam program yang telah disebutkan di atas. Sebelum diikutsertakan dalam masa pendidikan ini, 86 dari 130 orang yang diwawancarai telah aktif dalam 160 kelompok. Setelah menjalani pendidikan, mereka meningkatkan partisipasinya dalam 190 kelompok. Di samping itu, sebagian terbesar program dan kelompok yang mereka pilih sebelum masa pendidikan ini bersifat keagamaan (42%). Setelah masa pendidikan, 31% program yang diikuti para pendidik rakyat ini berhubungan dengan pengembangan pribadi. Juga kelompok politik bertambah dari 4% menjadi 7% dari seluruh kelompok. Akan tetapi, para pendidik rakyat dalam program *We Joined! And Now?* yang lebih erat berkaitan dengan Gereja, hanya menunjukkan perubahan kecil dalam jenis program.

Semua hasil survei dinyatakan sebagai positif, sejauh memperlihatkan tingkat par-

tisipasi yang lebih tinggi dari mereka yang diwawancarai dalam kegiatan kelompok yang berbeda. Tetapi jenis temuan ini ditunjukkan kepada mereka sendiri, mereka membaik-baikkan jawaban mereka. Pada umumnya mereka berkata bahwa keanggotaan dalam sejumlah kelompok yang lebih besar dan beraneka ragam telah mempunyai akibat yang berlawanan pada diri mereka. Mereka merasa telah tumbuh sebagai manusia dan telah memperkaya hidup mereka dengan mengambil bagian dalam sejumlah program yang lebih besar, tetapi mereka juga mengalami banyak kepenatan fisik sehingga biasanya menyebabkan lebih rendahnya tingkat efisiensi. Orang-orang yang diwawancarai ini menunjukkan kekecewaan mereka atas sejumlah kecil orang yang ingin menyumbangkan tenaganya untuk kegiatan kelompok, namun pada gilirannya menyebabkan mereka mencoba memperhatikan lebih banyak bidang sehingga mungkin lupa mempelajari beberapa masalah secara lebih mendalam.

Pentinglah disebutkan bahwa setelah masa persiapan, 27 dari seluruh 130 pendidik rakyat yang diwawancarai (21%) melanjutkan bekerja hanya dengan program yang telah mendidik mereka. Duapuluh dua orang dari keseluruhannya itu (17%) juga berpartisipasi dalam program lain. Sedangkan sisanya, 38 orang (29%) tidak turut serta dalam kegiatan apa pun sesudahnya, dan 43 orang (33%) ikut serta dalam kegiatan dengan kelompok lain daripada dengan kelompok di mana mereka telah berpartisipasi. Pada umumnya aktifnya berpartisipasi bersifat sebentar-sebentar, di saat-saat ketika para pendidik rakyat aktif dalam program pendidikan dan pada saat lain tatkala tidak ada aktivitas demikian.

Pada saat studi ini dilakukan -- yaitu se-

¹³Magendzo (1987).

panjang tahun 1987 -- tujuan menciptakan sumber daya pendidikan yang permanen pada tingkat kelompok tidak tercapai. Sumber daya pendidikan yang bersifat permanen dapat dimengerti sebagai organisasi para pendidik rakyat yang mengorganisasikan program berlainan dalam kelompok-kelompok dengan maksud mengintegrasikan dan merencanakan usaha perorangan lebih efisien pada saat tim profesional meninggalkan program. Alasan untuk kurangnya koordinasi demikian adalah bermacam-macam: (1) kurangnya imbalan uang yang memaksa para pendidik mencari pekerjaan alternatif; (2) ide kerja sukarela yang biasanya melekat pada pekerjaan kelompok; (3) kelelahan orang karena para pendidik rakyat harus melaksanakan terlalu banyak hal sekaligus; dan (4) kenyataan bahwa proyek yang dibiayai oleh pihak luar cenderung menentukan tujuan melampaui tujuan yang muncul di dalam kelompok, yang memang lebih bermakna untuk mobilisasi sosial.

Meskipun demikian, peranan yang dibawakan oleh mereka yang diwawancarai itu berarti. Yaitu, 74% dari mereka yang diwawancarai berpartisipasi dalam kelompok dan program setelah training, pertama-tama merasa diri mereka sebagai pendidik, bukan sebagai aktivis atau organisator kelompok. Hal ini lebih nyata lagi kalau kita memperhatikan program khusus, di mana, 90% dari mereka yang diwawancarai berpartisipasi dalam *the Leadership Workshop* dan 87% dari mereka yang berpartisipasi dalam *the Learning Workshops* pertama-tama merasa diri sebagai pendidik.

Temuan riset juga menunjukkan bahwa para partisipan telah mencapai tingkat sumber daya yang tinggi untuk beberapa kelompok di mana mereka berpartisipasi dalam menyusun acara penyiapan; sekitar 89%

melaporkan bahwa mereka telah mendorong partisipasi orang-orang lain; dan 80% telah berpartisipasi dalam merencanakan tahap-tahap proyek yang lain; serta kira-kira 27% dari mereka yang diwawancarai itu melaporkan bahwa mereka secara independen telah membentuk kelompok. Hasil ini karenanya memperlihatkan bahwa masa pendidikan dan keterlibatan dengan program yang berlainan mempunyai pengaruh positif pada tingkat kemandirian para partisipan dan menggalakkan mobilisasi sosial.

Mengenai konsepsi pendidikan masyarakat dari para pendidik rakyat, menunjukkan bahwa mereka yang diwawancarai cenderung memaparkan usaha mereka sebagai tugas yang menuntut waktu dan tenaga mereka. Sekitar 80% dari yang diwawancarai mengharapkan agar partisipasi mereka hendaknya dihargai oleh negara. Kuesioner tidak meminta keterangan tentang apa yang mereka maksudkan dengan "penghargaan oleh negara" ini, tetapi tampaknya mengacu pada pengakuan akan peranan mereka sebagai suatu tugas. Di samping itu, 71% dari mereka yang diwawancarai memahami keikutsertaan mereka dalam program pendidikan pada dasarnya bersifat suka rela. Mereka tidak memandangnya "hanya seperti tugas yang lain", dan karena itu tidak melihatnya sebagai alternatif untuk menunjang nafkah. Dalam hal ini seharusnya ditanyakan apakah NGO-NGO telah mempengaruhi persepsi tersebut. Barangkali pemberian gaji bagi para pendidik berdasarkan masyarakat dapat merupakan alternatif di daerah berpendapatan rendah. Bahkan meskipun konsep tentang pekerjaan sedang berubah karena keadaan ekonomi di Chili, perubahan ini tidak meliputi pendidik berdasarkan masyarakat, yang pekerjaannya masih dimengerti sebagai lebih erat berhubung-

an dengan berkhotbah daripada bekerja.¹⁴

Dalam bagian kedua wawancara, mereka yang diwawancarai secara luas mendebat jawaban mereka semula tentang mengajar sebagai tugas yang potensial. Mereka mengemukakan alasan berikut untuk menerangkan mengapa demikian tinggi persentase orang yang diwawancarai mendefinisikan usaha mereka sebagai komitmen sukarela:

1. Jawaban diberikan tanpa banyak menganalisis pokok persoalan atau implikasinya;
2. Karena ciri "komitmen" itu pekerjaan benar-benar tidak dapat menuntut imbalan;
3. Hilangnya ciri kesukarelaan dalam mengajar akan merongrong ide pendidikan rakyat dan melalui proses seleksi akan membuang sejumlah orang yang berahaga; dan
4. Ciri Kristiani dalam kegiatan para pendidik masyarakat itu membuat kegiatan itu bernilai suatu panggilan.

Meskipun demikian, dari mereka yang diwawancarai dalam survei pertama menyatakan bahwa pekerjaan pendidik seharusnya bersifat sukarela, 60% mengubah pendapatnya sesudah itu. Setelah mendalami persoalannya, mereka menunjukkan bahwa seha-

rusnya ada tindakan positif untuk memperbaiki (menggaji) kegiatan pendidikan rakyat.

Akhirnya didasarkan pada pendapat-pendapat yang baru kita paparkan dan mempertimbangkan kemampuan para pendidik melaksanakan program mereka maupun jenis kegiatan pendidikan yang mereka kembangkan, dapat disimpulkan bahwa kebanyakan dari mereka yang diwawancarai bisa diletakkan di kuadran kanan bawah Diagram 1, di mana terjadi pertemuan antara pendekatan mobilisasi sosial dan kegiatan pendidikan yang lebih besar. Akan tetapi, menimbang apa yang terjadi dengan para pendidik ini pada saat ikatan mereka dengan proyek berakhir, sebagai gantinya maka mereka harus diletakkan pada kuadran kanan atas di mana pendekatan ketergantungan dan kegiatan pendidikan yang lebih besar bertemu.

Hasil-hasil penyelidikan ini memperlihatkan bahwa organisasi non-pemerintah (seperti PIIE) seharusnya menyesuaikan sumbangan konkrit mereka dengan makin memobilisasi masyarakat lebih lanjut melalui pendidikan. Tak seorang pun bisa menyangkal pentingnya NGO-NGO dalam kehidupan bernegara. Hal ini pertama-tama terbukti oleh pendirian dan perkembangan sektor kelembagaan yang menganalisis pengalaman sosial. Sudut pandang ini memberikan perangkat kriteria alternatif untuk mengevaluasi program dan keputusan pemerintah. Kedua, NGO-NGO telah menguatkan kehidupan warga negara melalui pengembangan dan penggunaan sistem kerja yang partisipatoris.

Bahwa mereka yang terlibat dalam tiga program ini tidak memadukan kekuatan untuk mengembangkan badan koordinasi para pendidik rakyat dalam masyarakat, berarti

¹⁴Rakyat di daerah berpendapatan rendah telah tergeser dari pasaran kerja selama dasawarsa yang lalu dan mengalami pengurangan drastis dalam pendapatan mereka. Tantangan subsistensi telah mereka jawab secara kreatif, yang menyebabkan suatu fenomena baru: organisasi ekonomi berbasisan kelompok. Organisasi ini meliputi bengkel kerja produksi, kelompok pembela konsumen, persatuan penyewa, dan kelompok kesehatan. Organisasi ini dikelola seperti bisnis (Klenner & Vega, 1986) dan telah mengalami tingkat keuntungan maupun kapitalisasi. Dalam hal ini ada pertumbuhan dan pembiakan modal, yang terjadi karena terjadinya produksi barang dan jasa.

organisasi seperti PIIE dan CIDE, yang mengharapkan mobilisasi sosial, haruslah tetap melakukan proses evaluasi-diri yang sungguh-sungguh. Evaluasi ini hendaknya menjelaskan mengapa perkembangan perasaan harga diri para pendidik dan peningkatan perencanaan sosial mereka tidak menghasilkan kerjasama yang diharapkan di antara proyek yang berlainan di kelompok-kelompok, sehingga membatasi kemungkinan per-

tumbuhan dan pelibatan rakyat dalam jumlah yang lebih besar. Untunglah, lembaga-lembaga non-birokratis seperti lembaga yang dikaji ini mampu mengadakan kritik-diri maupun mengambil bagian dalam keinginan meningkatkan praktek dan prosedur riset. Praktek pendampingan merupakan contoh bagaimana peningkatan itu dapat terjadi dan bagaimana sumber-sumber daya pendidikan sedang mulai dikembangkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bengoa, J. "La educación para los movimientos sociales" [Education for social movements]. *Proposiciones*, 15 (1988): 12-41.
- Briones, G. Egana, L., Magendzo, A., & Jara, A. *Desigualdad educativa en Chile* [Educational inequality in Chile]. Santiago: Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación, 1984.
- Klenner, A., & Vega, H. El apoyo a la generación de ingresos en la economía de la pobreza [Support for generating income in the economy of poverty]. In *Del macetero al potrero; o de la micro al macro. El aporte de la sociedad civil a las políticas sociales* [From the gardener to the herdsman; or from micro to macro. Civil society's contributions to social policies]. New York: Columbia University, 1986.
- Labarca, G. "Educación formal y movimientos sociales: Las personas de las organizaciones sociales sobre el sistema escolar" [Formal education and social movements: People from social organizations speak about the school system]. *Proposiciones*, 15 (December, 1987).
- Magendzo, S. *Transferencia y apropiación en proyectos de educación popular: Identidad del educador popular, seis relatos de vida* [Transference and appropriation in popular education projects: Identity of the community-based educator, six life stories]. Santiago: PIIE Studies, 1987.
- Magendzo, S., & Medina, A. *Transferencia y apropiación de la capacitación y permanencia en programas de educación popular de organismos no gubernamentales* [Transference and appropriation in the preparation process and sense of permanence in popular education programs sponsored by NGOs]. Santiago: PIIE Studies, September 1988.
- Vaccaro, L. *El proceso de transferencia y apropiación en proyectos comunitarios: Marco de referencia para su análisis* [Transference and appropriation processes in community-based projects. A framework for analysis]. Internal Document, PIIE, Santiago, 1988.
- Vaccaro, L. *Transferencia y participación en intervenciones educativas comunitarias. Marco de referencia para un análisis* [Transference and participation in popular education interventions: A framework for analysis]. Internal Document, PIIE, Santiago, January 1989.

Dokumen

RINGKASAN PERISTIWA ASEAN

Kegiatan-kegiatan ASEAN

Penyusun:

SUDIBYO (Editor), Yoyok ARIESSUSANTO, F. ANDREA

I. MASALAH KTT ASEAN KE-4

II. KERJASAMA EKONOMI

A. Kerjasama Pariwisata dan Perdagangan
- Forum Pariwisata ASEAN

B. Kerjasama Perdagangan ASEAN
- Perdagangan Preferensi

C. Kerjasama Industri Mineral dan Energi
- Kerjasama Perminyakan ASEAN

III. KERJASAMA NON-EKONOMI

- Pertemuan Kelompok Kerja RTFV ke-6

IV. KERJASAMA NON-PEMERINTAH

A. Kerjasama Pemuda ASEAN
B. Kerjasama Lingkungan Hidup

V. MASALAH KEAMANAN

- Kerjasama Keamanan

VI. HUBUNGAN ASEAN DENGAN MITRA DIALOG

- Hubungan ASEAN-Jerman

VII. USAHA ASEAN MEMBANTU PENYELESAIAN KONFLIK KAMBOJA

- Pertemuan Anggota SNC dengan Ketua
Bersama PICC

I. MASALAH KTT ASEAN KE-4

Menteri Luar Negeri RI, Ali Alatas mengatakan kepada pers di Jakarta tanggal 3 Januari 1991 bahwa: (1) untuk menghadapi berbagai tantangan akibat perkembangan baru yang mewarnai situasi politik dan ekonomi dunia, penyelenggaraan KTT ASEAN ke-4 tahun 1991 diharapkan dapat menetapkan strategi dan arahan baru bagi kerjasama ASEAN; (2) ASEAN dituntut untuk meningkatkan kemauan politik dalam meningkatkan kerjasama ekonominya; (3) pada dekade 1990-an ASEAN perlu menetapkan berbagai langkah baru terutama untuk menghadapi: (a) perubahan yang terjadi di berbagai kawasan dunia seperti pembentukan Pasar Tunggal Eropa 1992; (b) gejala regionalisme di kawasan Amerika; (c) proses liberasi ekonomi negara-negara Eropa Timur dan dinamika kawasan Pasifik; (d) kemungkinan gagalnya Putaran Uruguay yang akan mempunyai dampak luas pada perdagangan global maupun perdagangan antar negara ASEAN dengan negara-negara di dunia; (4) ASEAN perlu memikirkan kerangka kerjasama baru untuk menghadapi era pasca Kamboja; (5) kerjasama perdagangan antara ASEAN dengan mitra dialognya, terutama untuk memperbaiki akses barang-barang ASEAN ke pasaran negara-negara mitra dialog, dan kerjasama investasi termasuk alih teknologi, masih perlu ditingkatkan; (6) pada akhir tahun 1990 prospek penyelesaian masalah Kamboja secara damai dan menyeluruh tampak semakin mendekati tahap yang menentukan; (7) tahun 1990 ditandai dengan perkembangan-perkembangan yang seringkali penuh kontras dan kontradiktif serta sekaligus merupakan tahun peralihan dan penuh ketidakpastian. Di satu pihak terdapat banyak harapan dan peluang baru namun di lain pihak sarat dengan tantangan maupun permasalahan baru; (8) letusan krisis Teluk akibat serbuan Irak ke Kuwait 2 Agustus 1990 yang diikuti dengan aneksasi Kuwait oleh Baghdad merupakan ujian pertama atas konstalasi politik dunia pasca perang dingin; (9) dunia internasional merasa gembira dengan perkembangan yang terjadi menyangkut semangat kerjasama Dewan Keamanan PBB tahun 1990, karena kelima anggota Tetap Dewan telah mampu menyelaraskan langkah mereka dalam menghadapi berbagai permasalahan dunia; (10) keselarasan itu hendaknya jangan sampai menjurus ke arah pengaturan masalah dunia yang didikte oleh ke-5 anggota tetap DK PBB, meskipun hal ini belum terjadi tetapi perlu diwaspadai dan jangan sampai merugikan negara-negara kecil atau menengah (*Suara Karya*, 4-1-1991).

II. KERJASAMA EKONOMI

A. KERJASAMA PARIWISATA DAN PERDAGANGAN

Forum Pariwisata ASEAN

Ketua Panitia Pelaksana *ASEAN Tourism Forum* (ATF) ke-10 1991 Tuti Sunario mengatakan kepada Kompas tanggal 17 Desember 1990 bahwa: (1) ATF ke-10 yang akan berlangsung di Bandung tanggal 12-16 Januari 1990 merupakan ajang pembuka untuk memperlihatkan kepada dunia internasional tentang kekuatan kerjasama ASEAN; (2) melalui ATF ASEAN ingin menunjukkan kekayaan, keanekaragaman dan produk-produk yang komplementer dari para anggotanya serta membuat kawasan ini mencuat sebagai tujuan wisata utama para wisatawan dunia; (3) dalam ATF ke-10 ini akan dilangsungkan pertemuan para Menteri Pariwisata negara anggota ASEAN dan diselenggarakan *Travel Trade Exchange* (TRAVEX) yang merupakan komponen kunci penyelenggaraan ATF 1991; (4) TRAVEX merupakan arena pertemuan para penjual produk dan jasa pariwisata seperti hotel, biro perjalanan, perusahaan penerbangan dan persewaan mobil (*Kompas*, 19-12-1990).

Sekretaris Panitia Nasional ATF 1991, Drs. Udin Saefudin mengatakan kepada pers di Bandung tanggal 30 Desember 1990 bahwa: (1) ATF 1991 akan dihadiri enam menteri pariwisata ASEAN, para ahli pariwisata, pengusaha hotel, biro perjalanan, wartawan dan penulis pariwisata dan wisatawan dari 24 negara; (2) diharapkan ATF 1991 akan diliput oleh 90 orang wartawan dan 60 orang di antaranya dari luar negeri; (3) persiapan kegiatan ATF dapat diselesaikan dengan baik termasuk transportasi udara, darat dari Jakarta ke Bandung dan hotel bagi para peserta serta rencana kunjungan ke obyek wisata dan kegiatan kesenian yang akan disajikan (*Angkatan Bersenjata*, 3-1-1991).

Kepala Humas Diparda Jabar, Rahayu Wikanda, mengatakan kepada pers di Bandung tanggal 5 Januari 1991 bahwa: (1) Diparda Jabar akan menyelenggarakan Pekan Pariwisata Jawa Barat pada tanggal 10-17 Januari di Plaza Baneuy Perma untuk menyambut ATF 1991 di Bandung; (2) penyelenggaraan Pekan Pariwisata ini sangat tepat karena wisatawan dari mancanegara akan membanjir; (3) kehadiran wisatawan mancanegara merupakan kesempatan yang berharga bagi peserta Pekan Pariwisata, terutama untuk mempromosikan

sikan barang-barang produksi dalam negeri yang saat ini mampu bersaing di pasaran internasional (*Angkatan Bersenjata*, 8-1-1991).

Ketua Dewan Pariwisata Malaysia, Syed Mohamed Aidid mengatakan kepada pers di Kuala Lumpur tanggal 8 Januari 1991 bahwa: (1) enam negara anggota ASEAN akan bekerjasama meningkatkan pariwisata di wilayah Asia Tenggara dengan melakukan promosi bersama untuk mendatangkan lebih banyak wisatawan asing yang berkunjung lebih lama di wilayahnya; (2) Muangthai memulai program itu ketika kapal pesiar negaranya "Puteri Andanan" melakukan pelayaran pertama di Pulau Pinang bulan Desember 1990; (3) menjalin kerjasama seperti itu sangat penting karena jumlah wisatawan di setiap negara anggota ASEAN tidak sama; (4) telah tiba waktunya bagi semua negara anggota ASEAN bekerjasama, di samping juga mempersiapkan diri menyambut Tahun Kunjungan ASEAN 1992; (5) dengan memperpanjang rute pelayaran secara langsung akan meningkatkan jumlah wisatawan (*Antara*, 9-1-1991).

Ketika membuka Panel Diskusi Kepariwisataan Keluarga Besar Golkar di Bandung tanggal 7 Januari 1991, Ketua DPD Golkar Jabar, H. Agus Muhyidin mengatakan bahwa: (1) pembangunan kepariwisataan Indonesia saat ini dinilai memiliki momentum sangat penting dan strategis dengan adanya ATF 1991 di Bandung dan Tahun Kunjungan Indonesia 1991; (2) momentum yang baik itu perlu inovasi kreatif dan terpadu dari seluruh warga negara untuk mendorong suksesnya kepariwisataan di tanah air; (3) kepariwisataan mempunyai nilai tambah, baik dalam aspek sosial budaya, sosial ekonomi maupun sosial politik, karenanya sangat tepat jika selaku warga negara yang berwatak pejuang serta setiap kader Orpol dan Ormas khususnya Golkar mengambil prakarsa kreatif untuk menyukseskan ATF dan VIY 1991; (4) pembangunan sektor kepariwisataan yang tengah digalakkan memerlukan dukungan dan keterpaduan dari sektor-sektor lainnya sehingga konsistensinya tetap terpelihara dan terjamin, terutama untuk memelihara dan membina kepribadian bangsa serta mutu kelestarian sumber daya dan lingkungan hidup; (5) pengembangan kepariwisataan di Jawa Barat harus tetap mengarah pada upaya untuk memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa serta menanamkan jiwa semangat dan nilai-nilai luhur bangsa guna lebih memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional; (6) momentum yang baik ini hendaknya mengubah setiap warga negara untuk memanfaatkan potensi budaya dan sumber daya alam yang kita miliki (*Antara*, 10-1-1991).

Ketika melakukan inspeksi pada apel kesiapan dan pengamanan ATF 1991 di Silang Monas Barat Jakarta, tanggal 9 Januari 1991, Menparpostel Soesilo Soedarman mengatakan bahwa: (1) usaha kepariwisataan nasional yang dicanangkan tahun 1991 ini sebagai tahun kunjungan Indonesia tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri, tetapi keberhasilannya memerlukan kegotongroyongan dari seluruh unsur, baik kalangan Sipil, ABRI dan Polri maupun kalangan usaha kepariwisataan dan dukungan seluruh lapisan masyarakat; (2) bila dilihat dari kesiapan pengamanan dan ketertiban, maka pelaksanaan kegiatan Tahun Kunjungan Indonesia 1991 akan berjalan sukses dan penuh kemantapan; (3) kepariwisataan nasional telah dicanangkan untuk menjadi pusat perhatian seluruh masyarakat, terutama untuk lebih memperbesar dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional yang sekaligus peningkatan penyerapan tenaga kerja serta perluasan usaha; (4) kesiapan dari unsur-unsur pengamanan ATF merupakan salah satu kegiatan penting dalam tahun kunjungan Indonesia 1991; (5) ATF merupakan suatu forum yang dihadiri oleh tokoh-tokoh kepariwisataan internasional, karenanya keberhasilannya akan membawa arti penting bagi Indonesia. Keberhasilan ATF akan memperbesar kepercayaan yang lebih besar dari luar negeri atas kemampuan Indonesia untuk menyelenggarakan konperensi tingkat internasional; (7) ATF 1991 merupakan ajang latihan bagi Indonesia untuk menghadapi konperensi-konperensi yang lebih besar pada bulan April 1991 yakni PATA Mart di Jakarta, PATA World Charter dan Konperensi PATA di Bali serta konperensi para Menteri Telekom negara-negara OKI di Bandung (*Angkatan Bersenjata*, 11-1-1991).

Siaran pers *ASEAN Tourism Information Centre* mengatakan bahwa: (1) perusahaan penerbangan negara anggota ASEAN mendukung sepenuhnya kesuksesan penyelenggaraan promosi Tahun Kunjungan ASEAN 1992 (VAY 1992); (2) dukungan ini merupakan persetujuan atas usulan yang diajukan *ASEAN Sub-Committee on Tourism* (SOCT atau Sub-Komite Kepariwisataan ASEAN); (3) armada penerbangan ASEAN diharapkan turut serta secara aktif mengadakan penerbangan cuma-cuma bagi para wartawan asing yang diundang dari Jepang, Jerman dan Australia untuk berkunjung ke ASEAN; (4) perusahaan penerbangan ASEAN diharapkan menonjolkan dan menyajikan tarif serta paket liburan dari masing-masing negara secara khusus; (5) perusahaan penerbangan ASEAN sepakat untuk mempertimbangkan pemberian bantuan pengangkutan barang tambahan VAY 1992 kepada ASEAN SCOT dan

menyajikan artikel-artikel khusus pada majalah tentang daerah tujuan wisata di ASEAN selama penerbangan; (6) ASEAN sepakat untuk menyelenggarakan sedikitnya satu peristiwa ASEAN yang sangat penting dan dua peristiwa nasional lainnya guna menjadikan tahun 1992 sebagai tahun yang penuh dengan pesta tanpa henti yang menghibur para pengunjung. Kegiatan ini akan menampilkan keanekaragaman budaya sosial dan etnis dari kawasan Asia Tenggara sekaligus memperlihatkan semangat kerjasama dan solidaritas regional (*Pelita*, 12-1-1991).

Ketika menerima enam Menteri Kepariwisata ASEAN di Istana Merdeka tanggal 12 Januari 1991, Presiden Soeharto mengatakan bahwa bangsa-bangsa di kawasan ASEAN harus bersiap-siap menghilangkan dampak negatif pariwisata yang timbul akibat membunjarnya wisatawan mancanegara ke kawasan ini sehubungan dengan dicanangkannya Tahun Kunjungan ASEAN 1992 (*Kompas*, 13-1-1991).

Sesuai diterima Presiden Soeharto di Istana Merdeka, Menparpostel Soesilo Soedarman mengatakan kepada pers bahwa: (1) ATF merupakan forum pertemuan tahunan antara sesama pembuat kebijaksanaan kepariwisataan ASEAN untuk merumuskan kebijakan bersama yang mengacu pada perkembangan ASEAN di masa mendatang; (2) Indonesia mengusulkan perlunya membahas masalah-masalah strategis yang dapat mendorong serta berkaitan erat dengan peningkatan dan perkembangan pariwisata di masa mendatang seperti: (a) kemudahan di bidang angkutan udara dan laut antara negara-negara ASEAN; (b) kemudahan kunjungan wisatawan ASEAN; (c) latihan dan pembinaan sumber daya manusia (*Kompas*, 13-1-1991).

ATF 1991 berlangsung di Bandung tanggal 12-16 Januari 1991, dihadiri oleh 254 *buyers* dari berbagai negara dan 237 *sellers* dari semua negara anggota ASEAN serta para pemimpin badan pariwisata dari semua negara anggota ASEAN. Menparpostel Soesilo Soedarman mengatakan pada pembukaan itu bahwa: (1) dunia menjadi semakin mengecil dan negara-negara anggota ASEAN memainkan peranan untuk membuat dunia menjadi tempat yang berbahagia; (2) walaupun kadang-kadang antara sesama negara tidak sepakat, namun manusia tetap saja mengalir ke negara yang satu dan lainnya. Hal ini membuktikan bahwa pariwisata merupakan jembatan yang kuat bagi pergaulan manusia; (3) ATF akan membicarakan usaha dan merencanakan agar semakin banyak manusia saling mengunjungi; (4) Indonesia mengucapkan selamat kepada Ma-

laysia yang telah berhasil menyelesaikan Tahun Kunjungan Malaysia 1990 dengan sukses; (5) pada tahun 1990 Indonesia telah dikunjungi oleh lebih dari 2 juta wisatawan mancanegara yang menghasilkan sekitar US\$1,8 milyar (*Suara Pembaruan*, 13-1-1991); (6) komponen pariwisata ASEAN agar meningkatkan kerjasama demi kemajuan bersama; (7) ASEAN yang lebih damai, dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, memiliki peluang yang lebih baik dibandingkan dengan berbagai bagian dunia yang diliputi gejolak dan kesulitan ekonomi (*Suara Karya*, 14-1-1991).

Mantan Menlu RI, Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja mengatakan dalam Pertemuan ATF tanggal 12 Januari 1991 bahwa: (1) Konperensi Kepariwisataan ASEAN (ATF) merupakan salah satu bukti eratnya hubungan antar negara-negara anggota ASEAN di berbagai bidang; (2) sejak berdirinya, ASEAN telah mengalami kemajuan yang menggembirakan, khususnya sejak tahun 1979; (3) setelah Deklarasi Bangkok 1967, ASEAN langsung memulai kegiatannya dengan saling mengadakan hubungan persahabatan; (4) walaupun berada di tengah konflik internasional ASEAN tetap berdiri teguh; (5) ASEAN telah mengeluarkan Deklarasi ZOPFAN yang menunjukkan tekad untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara bebas dari campur tangan asing; (6) berakhirnya permusuhan di Indocina pada 1975 telah memberi harapan kepada Asia Tenggara untuk menjadi kawasan yang tenang dan damai; (7) ASEAN telah menghasilkan dua dokumen penting yaitu *The Declaration of ASEAN Concord* dan *The ASEAN Treaty of Peace, Amity and Cooperation* (Perjanjian Perdamaian, Persahabatan dan Kerjasama); (8) invasi Vietnam ke Kamboja 1978 telah membangkitkan reaksi ASEAN untuk mengatasi konflik tersebut dengan menentang penggunaan kekerasan sesuai dengan Piagam PBB dan Dasa Sila Bandung; (9) masalah Kamboja menjadi faktor penting untuk menciptakan persatuan dan kesatuan ASEAN serta merupakan pertimbangan politik internasional yang perlu mendapat perhatian; (10) kerjasama ASEAN harus ditingkatkan di segala bidang untuk menciptakan kebiasaan bekerjasama dan memperkuat persatuan di antara negara-negara anggota dan rakyatnya; (11) sejak beberapa tahun lalu orientasi ekspor ASEAN mengalami banyak kemajuan dan membuat kelompok ASEAN menjadi salah satu kawasan yang tumbuh pesat di dunia; (12) peningkatan pendapatan di negara-negara Asia termasuk ASEAN pada tahun 1970-an telah memberi harapan besar bagi usaha perjalanan dan pariwisata selama sepuluh tahun terakhir ini; (13) prospek ekonomi ASEAN di masa

mendatang tampak dibayangi oleh: (a) kenaikan harga minyak akibat krisis Teluk dan gagalnya Putaran Uruguay; (b) kerjasama ekonomi seperti Pasar Tunggal Eropa 1992 dan perluasan kerjasama perdagangan AS dengan Kanada serta negara-negara Amerika Utara. Keadaan ini tidak mengkhawatirkan karena kegiatan ekonomi di kawasan Asia Tenggara semakin meningkat yang juga telah bekerjasama dengan Jepang dan negara-negara maju Asia lainnya seperti Korea Selatan, Taiwan dan Hongkong; (14) pembatasan-pembatasan yang dikenakan oleh Eropa Barat dan Amerika Utara yang disebabkan oleh kebijaksanaan ekonomi dan resesi dapat berakibat pada orientasi negara-negara industri di Asia akan beralih ke Asia Tenggara yang semakin menarik bagi mereka; (15) stabilitas politik di Timur Tengah, Asia Selatan dan ketidakpastian di Uni Soviet dan Eropa Timur membuat Asia Tenggara semakin menarik bagi para investor dan pengusaha asing; (16) peristiwa Tien An Men memberi peluang bagi ASEAN untuk mengguguli Cina guna menarik investasi dan usaha perjalanan, namun Cina suatu saat akan tetap menjadi saingan yang kuat bila negara ini kembali memainkan peranan sepenuhnya; (17) usaha pariwisata, khususnya di Asia Tenggara, tidak mudah terpengaruh oleh keadaan politik dan ekonomi yang kurang menentu; (18) pendapatan dari usaha perjalanan dan pariwisata dapat menggantikan ekspor barang-barang manufaktur sebagai penghasil devisa di negara-negara ASEAN; (19) untuk mengatasi keadaan yang tidak menentu itu, yang harus dilakukan ASEAN adalah mendapatkan kesempatan semaksimal mungkin akan meningkatkan kerjasama yang saling menguntungkan serta memadukan antara pasar dan pelayanan (*Angkatan Bersenjata*, 15-1-1991).

Dalam pertemuan tanggal 13 Januari 1991, yang dihadiri oleh Direktur Keuangan pada Kementerian Keuangan Brunei Darussalam, Dato Paduka Haji Yaakub bin Abu Bakar, Wakil Menteri Pariwisata Filipina, Narzalina Z. Lim, Menteri Kebudayaan, Seni dan Pariwisata Malaysia, Dato Sabbaruddin Chik, Menteri Negara Perdagangan dan Industri Singapura, Mah Bow Tan, Gubernur Badan Pariwisata Muangthai, Dharmoon Praoahaubmoh serta Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Indonesia, dicapai komunikasi bersama yang menegaskan ASEAN; (1) memerlukan visi dan strategi baru untuk mengembangkan industri pariwisatanya guna menghadapi perubahan-perubahan politik dan ekonomi global yang sedang berlangsung; (2) sepakat untuk terus meningkatkan promosinya sebagai tujuan wisata setelah *Visit ASEAN Year 1992* usai; (3) sepakat

untuk melestarikan warisan budaya dan lingkungan sebagai bagian integral pembangunan pariwisata; (4) sepakat untuk lebih meningkatkan kunjungan wisata intra ASEAN terutama di kalangan pemuda guna memperkokoh saling pengertian dan saling menghargai di antara sesama anggota ASEAN; (5) mengakui bahwa peran pariwisata semakin meningkat dalam pembangunan negara-negara anggota, dan kunjungan wisata intra ASEAN memberikan sumbangan yang besar bagi industri pariwisata di kawasan ini; (6) menunjuk Sub-Komite Pariwisata ASEAN untuk melaksanakan kesepakatan yang dicapai di Bandung (*Suara Karya*, 16-1-1991).

Direktur Eksekutif Pusat Informasi Wisata ASEAN (*ASEAN Tourism Information Centre - ATIC*) Abdullah Jonid mengatakan kepada pers di Bandung tanggal 16 Januari 1991 bahwa: (1) sedikitnya 25 juta wisatawan asing diharapkan berkunjung ke kawasan ASEAN pada *Visit ASEAN Year 1992*; (2) target ini dapat dicapai meskipun jumlah wisatawan yang berkunjung ke kawasan ASEAN pada 1989 baru tercatat 16,7 juta orang; (3) ASEAN akan menggalakkan promosi bersama dengan negara-negara anggota untuk menjadikan kawasan ini sebagai satu daerah tujuan wisata; (4) pertumbuhan pariwisata ASEAN dari tahun ke tahun terus meningkat dan sasaran utama promosinya adalah Jerman, Australia dan Jepang; (5) ASEAN akan berupaya menjaring wisatawan di kawasan sendiri; (6) masyarakat anggota ASEAN sendiri harus menyadari pentingnya kebersamaan dan perlunya meningkatkan *intra travel tour* dengan membuat paket-paket tour ke negara anggota; (7) untuk mencapai target tersebut ATIC akan mengumpulkan dana promosi dari tiap-tiap negara anggota US\$500.000; (8) Jepang dan MEE telah memberikan sumbangan untuk membantu pembuatan bahan promosi berupa brosur, poster, *calender of event* guna menyebar luaskan informasi ASEAN sebagai daerah tujuan wisata; (9) Jepang mendukung dana untuk menggalakkan VAY 1992 di negaranya; (10) MEE memberikan dana US\$2,6 juta untuk mempromosikan ASEAN di Inggris, Perancis, Denmark, Norwegia, Swedia dan Finlandia; (11) dengan promosi yang gencar itu, pada tahun 1992 ASEAN akan dikunjungi oleh 25 juta wisatawan dengan pemasukan sekitar US\$24,6 milyar dan lama tinggal 7-8 hari; (12) selain menggelar berbagai atraksi, ASEAN berupaya menyebar wisatawan dengan membuat paket-paket yang meliputi negara-negara anggota dan memberikan korting tiket pesawat 20-25%, sehingga dengan biaya

lebih murah wisatawan asing dapat mengunjungi negara-negara ASEAN (*Bisnis Indonesia*, 17-1-1991).

B. KERJASAMA PERDAGANGAN ASEAN

Perdagangan Preferensi

Dewan Pengembangan Perdagangan Singapura dalam siaran persnya tanggal 3 Januari 1991 mengatakan bahwa: (1) ASEAN menambah lagi 459 barang yang mendapatkan pengurangan bea masuk jika diperdagangkan antara sesama negara anggotanya dan semuanya itu dimasukkan dalam daftar APTA (*ASEAN Preferential Trade Agreement*); (2) konsesi yang akan diberikan sampai masa berlakunya masa pengurangan bea 1992 berjumlah 1.529 jenis barang, hal itu sesuai dengan kesepakatan Perdagangan Preferensi ASEAN (APTA); (3) barang tambahan itu termasuk peralatan rumah tangga, mesin perkantoran, mesin listrik dan non-listrik lainnya, minyak nabati, produk-produk kimia, tekstil dan garmen serta produk kertas; (4) langkah ini merupakan bagian dari paket lima tahun APTA yang pertama kali dilaksanakan tahun 1987; (5) program perdagangan preferensi ASEAN yang dimulai sejak tahun 1978 bertujuan untuk meningkatkan perdagangan intra ASEAN, dan dalam tiga tahun terakhir telah mencapai 2.514 barang yang sudah dimasukkan ke dalam APTA; (6) sejak tahun 1987 barang yang mendapatkan pengurangan bea masuk telah meningkat menjadi 9.622 jenis dan pada tahun 1991 barang yang memperoleh pengurangan bea masuk akan dinaikkan lagi menjadi 4.095 jenis (*Angkatan Bersenjata*, 3-1-1991).

C. KERJASAMA INDUSTRI MINERAL DAN ENERGI

Kerjasama Perminyakan ASEAN

Pertemuan Perusahaan Minyak Negara-negara ASEAN berlangsung di Manila tanggal 3-4 Januari 1991 diikuti oleh wakil-wakil perusahaan minyak negara seperti, Petronas dari Malaysia, Pertamina dari Indonesia, *Petroleum Authority of Thailand* dari Muangthai, *Singapore Petroleum Co.* dari Singapura dan Unit Minyak pada Kementerian Keuangan Brunei serta PNOG, untuk membahas mekanisme pembagian minyak dan menetapkan berapa banyak Indonesia, Malaysia dan Brunei dapat berbagi minyak dengan Singapura, Muangthai dan Filipina jika terjadi perang Teluk.

Wakil Presiden Perusahaan Minyak Nasional Filipina (*Philippine National Oil Co.*), Orlando Galang mengatakan kepada pers di Manila tanggal 3 Januari 1991 bahwa: (1) pertemuan akan menentukan seberapa banyak produser minyak dapat menyediakan minyak kepada negara anggota ASEAN lainnya yang tidak mempunyai penghasilan di sektor ini; (2) ASEAN akan bersiap-siap dan jika perlu akan melakukan pembagian minyak sehingga tidak kebingungan; (3) jika perang Teluk terjadi, ASEAN akan melakukan sistem pembagian minyak darurat sesuai dengan mekanisme yang disepakati sejak akhir 1970-an; (4) para pejabat perminyakan akan menuntaskan penyelesaian masalah yang mungkin timbul dalam pelaksanaan mekanisme pembagian minyak dan akan menentukan seberapa banyak minyak yang tersedia dengan skenario tertentu; (5) mereka akan mempertimbangkan apakah produser minyak perlu meningkatkan produksinya untuk memenuhi permintaan; (6) meskipun perang Teluk terjadi produksi minyak di Timur Tengah belum tentu terhenti, namun masalahnya adalah bagaimana mendapatkan minyak dari luar negara Teluk; (7) selama ini Filipina mengimpor sekitar 80% kebutuhan minyaknya dari Timur Tengah dan diperkirakan akan menggunakan mekanisme pembagian minyak jika terjadi perang Teluk; (8) hingga kini negaranya telah menimbun minyak yang setara untuk kebutuhan 60-70 hari; (9) konsumsi minyak harian rata-rata di Filipina 240.000 barrel, Singapura 100.000 barrel, dan Muangthai 450.000 barrel (*Pelita*, 4-1-1991).

Hasil pertemuan antara lain: (1) menegaskan kembali komitmen mereka jika perang Teluk terjadi; (2) setiap negara anggota di kawasan ASEAN yang kekurangan persediaan minyak lebih dari 20% dapat mencari bantuan berdasarkan APSA; (3) hasil pertemuan ini akan disampaikan kepada para Menteri Ekonomi ASEAN untuk disahkan (*Antara*, 5-1-1991).

III. KERJASAMA NON-EKONOMI

PERTEMUAN KELOMPOK KERJA RTFV ASEAN KE-6

Pertemuan Kelompok Kerja Radio, Televisi, Film dan Video (RTFV) ASEAN ke-6 berlangsung di Kuala Lumpur tanggal 27 November 1990 untuk membahas peran serta dan rasa kebersamaan ASEAN. Pertemuan dihadiri oleh utusan dari Badan Penyiaran Singapura (SBC), Radio dan Televisi Brunei, Biro Humas Kementerian Penerangan Muangthai, Biro Penerangan Ke-

menterian Luar Negeri Filipina dan Radio Televisi Malaysia (RTM).

Sekretaris Urusan Parlemen pada Kementerian Penerangan Malaysia, Fauzi Abdul Rahman, mengatakan pada pembukaan pertemuan itu bahwa: (1) proyek-proyek yang dilaksanakan ASEAN agar diselaraskan dengan upaya menuju penciptaan rasa kebersamaan di antara penduduk negara anggota ASEAN; (2) jika berbicara mengenai ASEAN berarti membicarakan penduduk sekitar 300 juta jiwa, maka rakyat ASEAN yang seharusnya menghormati dan menghargai ASEAN terlebih dahulu; (3) jika seluruh sumber daya manusia dan alam yang ada di antara negara anggota ASEAN digabungkan dan stabilitas politik terjamin, maka ASEAN akan menjadi kawasan makmur; (4) harus diadakan usaha untuk menanamkan rasa kebersamaan dan peran serta yang wajar di antara rakyat ASEAN; (5) dengan Tahun Kunjungan ASEAN 1992 seluruh rakyat ASEAN dapat memainkan peranan positif untuk menciptakan kebersamaan yang sungguh-sungguh; (6) komunikasi melalui radio, televisi dan film telah membuat negara-negara anggota ASEAN semakin erat (*Antara*, 28-11-1990).

IV. KERJASAMA NON-PEMERINTAHAN

A. KERJASAMA PEMUDA ASEAN

Pertemuan segitiga delegasi pemuda Indonesia, Malaysia dan Singapura berlangsung di Batam tanggal 14-15 Desember 1990, yang dihadiri oleh Menpora RI, Akbar Tanjung, Menteri Belia dan Sukan Malaysia, Annuar Musa dan Menteri Kesehatan merangkap Ketua Dewan Nasional Pemuda Singapura, Yeo Cheow Tong, serta para pejabat senior kepemudaan untuk: (1) menyelesaikan beberapa kertas kerja yang menyangkut masalah kepemudaan baik di tiga negara maupun ASEAN; (2) menentukan Hari Pemuda ASEAN dan pembentukan sistem informasi kepemudaan ASEAN; (3) mempersiapkan program pemuda guna mendukung kegiatan "Visit ASEAN Year 1992"; (4) bertukar pandangan mengenai masalah kepemudaan guna menyambut pertemuan pemuda ASEAN yang akan dilaksanakan pada bulan Februari 1991 di Singapura. Pertemuan itu juga akan membahas rencana untuk meningkatkan pengajaran bahasa Inggris maupun pengetahuan tentang masalah internasional.

Pada akhir pertemuan mereka sepakat: (1) untuk mengusulkan tanggal 8 Agustus yang merupakan tanggal berdirinya ASEAN sebagai "Hari Pemuda ASEAN yang akan mulai dicanangkan pada tahun 1992 dan bertepatan dengan Tahun Kunjungan Wisata ASEAN. Penetapan tanggal ini selain untuk mendukung program pariwisata ASEAN juga untuk memperingati 25 tahun kerjasama ASEAN; (2) akan menajaki kemungkinan menyelenggarakan pertemuan Tingkat Menteri Pemuda se ASEAN secara berkala; (3) pertemuan trilateral ini akan memprogramkan pertemuan bilateral dengan Brunei Darussalam, Filipina, Muangthai, serta antara Malaysia dan Singapura; (4) untuk mengaktifkan Komite Kerjasama Pemuda ASEAN (CAYC) dan akan membentuk sistem informasi pemuda ASEAN; (5) untuk bertemu kembali di Singapura tanggal 26-28 Februari 1991 dalam forum ke-8 Sub-Komite ASEAN Urusan Pemuda. Mereka juga mendesak agar hasil-hasil pertemuan ini diikuti dengan program-program nyata (*Artara*, 17-1-1990).

Sesuai pertemuan, Menteri Kesehatan merangkap Ketua Dewan Nasional Pemuda Singapura, Yeo Cheow Tong, mengatakan kepada pers bahwa: (1) Menpora Akbar Tanjung telah mengambil kebijakan yang tepat dengan memilih Batam sebagai tempat konperensi segitiga; (2) segitiga pertumbuhan (*triangle growth*) yang meliputi Riau, Johor dan Singapura agar dinamakan "Segitiga Pemuda"; (3) para menteri agar memusatkan perhatian pada pembinaan generasi muda pada saat terjadi peredaan ketegangan antara blok Barat dan Timur; (4) di masa mendatang peluang perdagangan akan meningkat meskipun akan diikuti dengan persaingan-persaingan; (5) negara-negara yang bekerjasama akan menempati posisi yang baik dan memperoleh kemajuan untuk menghadapi persaingan itu.

Menteri Belia dan Sukan Malaysia, Annuar Musa mengatakan bahwa: (1) pertemuan telah menghasilkan program-program nyata; (2) negara anggota ASEAN agar bertukar informasi tentang pembinaan generasi muda dan mengadakan pertukaran tenaga ahli untuk meningkatkan kualitas generasi muda ASEAN; (3) partisipasi para ahli akan memberikan dorongan yang besar bagi pengembangan generasi muda; (4) pertemuan ini tidak akan ada artinya jika tidak menghasilkan program-program yang nyata (*Jakarta Post*, 17-12-1990).

Sesuai pertemuan antara Menpora, Ir. Akbar Tan-

jung dan mantan Menpora Malaysia yang kini menjadi Menhankam Malaysia, Datuk Nadjib bin Tun Abdul Razak, di Jakarta, Kepala Humas Menpora Drs. B. Artonang mengatakan kepada pers di Jakarta tanggal 8 Januari 1991 bahwa: (1) sistem informasi pemuda ASEAN yang telah lama tidak aktif akan diaktifkan kembali; (2) pengaktifan ini dimaksudkan untuk menunjang informasi di kalangan pemuda ASEAN. Dalam pembicaraan di Batam pertengahan Desember 1990 selain mendukung rencana tersebut, Menpora Malaysia Anwar Musa juga bersedia untuk merumuskan perlunya peringatan Hari Pemuda ASEAN (*ASEAN Youth Day*) dan merintis Visit ASEAN; (3) Menhankam Malaysia minta kepada Menpora agar hubungan persahabatan ini terus dilanjutkan dan tidak terputus hanya karena perbedaan jabatan serta meminta agar kerjasama yang dirintis selama ini secepatnya dikonkritkan karena tujuannya ke Indonesia saat ini adalah untuk merealisasi kerjasama yang telah dirintis selama ini (*Pelita*, 9-1-1991).

B. KERJASAMA LINGKUNGAN HIDUP

Seminar masalah Lingkungan Hidup ASEAN akan berlangsung di Banda Aceh tanggal 14 Januari 1991 dengan tema "Membina Lingkungan Hidup Dalam Upaya Meningkatkan Martabat Manusia. Seminar akan dihadiri oleh 250 ulama dan ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu, 45 orang di antaranya dari Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam dan Muangthai, untuk membahas 15 kertas kerja yang terdiri atas makalah kunci, undangan dan sumbangan.

Sekretaris Panitia Pelaksana Seminar dari Indonesia, Zainal Arifin Siregar, mengatakan kepada pers di Banda Aceh tanggal 12 Desember 1990 bahwa: (1) Walikota Padang, Sjahrul Ujud SH, dan Walikota Bogor, HM Suratman, akan membicarakan pengalamannya membina keserasian lingkungan hidup, sedangkan Walikota Banda Aceh, Drs. Baharuddin Yahya, akan membahas Cita-cita dan Rencana Membina Banda Aceh Menjadi Kota Beriman; (2) utusan Singapura akan membahas Cara Membina Singapura Menjadi Kota Terbersih di Asia Tenggara; (3) pertemuan akan dibuka oleh Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup Indonesia, Prof. Dr. Emil Salim dan ditutup oleh Menparpostel, Soesilo Soedarman (*Angkatan Bersenjata*, 14-12-1990).

V. MASALAH KEAMANAN

- KERJASAMA KEAMANAN

Ketika menerima kunjungan kehormatan, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Filipina, Jenderal Renato S. De Villa, di Jalan Cendana Jakarta tanggal 5-1-1991, Presiden Soeharto mengatakan bahwa: (1) masalah yang harus diatasi pemerintah Filipina bukan hanya aspek politik dan keamanan, tetapi juga aspek-aspek ekonomi, sosial dan budaya; (2) negara-negara ASEAN diharapkan terus meningkatkan ketahanan nasionalnya masing-masing, karena hal ini akan mampu menciptakan ketahanan regional; (3) ketahanan nasional sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di seluruh negara anggota ASEAN (*Suara Karya*, 7-1-1991).

VI. HUBUNGAN ASEAN DENGAN MITRA DIALOG

- HUBUNGAN ASEAN-JERMAN

Duta Besar Republik Federal Jerman, Theodor Wallau, mengatakan pada acara penandatanganan naskah Pengaturan Pelaksanaan Dana Studi dan Keahlian bagi negara-negara ASEAN di Jakarta tanggal 10 Januari 1991 bahwa: (1) Jerman memberikan bantuan US\$1 juta kepada negara anggota ASEAN yang merupakan kelanjutan dan perluasan bantuan yang sebelumnya bersifat bilateral; (2) tujuan pemberian dana itu untuk meningkatkan kerjasama di antara negara anggota ASEAN; (3) dana ini dimanfaatkan untuk pembiayaan program pertukaran pengetahuan di berbagai bidang seperti perlindungan tanaman, pengelolaan hutan berkesinambungan, balai latihan kerja dan alih teknologi; (4) kerjasama antara Barat dan Timur serta bantuan dari Utara ke Selatan masing-masing tidak berdiri sendiri tetapi saling melengkapi; (5) melalui program ini Jerman berupaya memenuhi sasaran dari rencana Buenos Aires untuk meningkatkan dan mengimplementasikan "Kerjasama Teknik Sesama Negara-negara Berkembang" (TODC) yang telah diterima oleh 138 negara pada tahun 1978; (6) TODC adalah program yang dirancang untuk membantu dan mendukung negara-negara berkembang guna memperkuat proses perkembangannya melalui pertukaran sumber daya dan personil di antara mereka; (7) program Jerman-ASEAN ini mencerminkan partisipasi pemerintah Jerman untuk membantu ekonomi dan

sosial negara berkembang; (8) Jerman ingin menunjang kerjasama regional sehingga memungkinkan negara-negara berkembang berintegrasi di dalam perekonomian dunia; (9) meskipun ada perubahan-perubahan di Jerman dan Eropa, Jerman akan terus memenuhi tanggung jawabnya pada negara-negara berkembang (*Antara*, 10-1-1991).

Sementara itu, Sekretaris Jenderal ASEAN Rusli Noor mengatakan bahwa: (1) bantuan Jerman itu sangat efektif untuk mengembangkan proyek percontohan seperti program peningkatan sumber daya dan personil di antara negara berkembang yang selama ini disalurkan melalui TODC; (2) cara ini dipandang lebih menghemat biaya sekaligus meningkatkan kepercayaan diri secara kolektif di antara mereka; (3) Malaysia sebagai negara penghasil karet cukup potensial untuk dijadikan proyek percontohan bagi pengelolaan hutan berkesinambungan; (4) penerapan dan alih teknologi dilaksanakan melalui program pelatihan dan seminar-seminar; (5) proyek-proyek baru yang berhubungan dengan program yang menjadi kesepakatan bersama di antara negara anggota ASEAN akan diusulkan melalui komite yang ada dan selanjutnya diajukan ke negara pemberi bantuan seperti Jerman (*Antara*, 10-1-1991).

VI. USAHA ASEAN MEMBANTU PENYELESAIAN KONFLIK KAMBOJA

PERTEMUAN ANGGOTA SNC DENGAN KETUA BERSAMA PICC

Peremuan anggota SNC dengan Ketua Bersama PICC, berlangsung di Paris tanggal 21-23 Desember 1990, untuk membahas rencana proses perdamaian Kamboja.

Menteri Luar Negeri Perancis, Roland Dumas, mengatakan pada pembukaan pertemuan itu bahwa: (1) faksi-faksi Kamboja yang bertikai hendaknya menghentikan perselisihan dan menyadari bahwa pemecahan dengan cara militer tidak menyelesaikan masalah; (2) masyarakat internasional tidak akan memperhatikan masalah Kamboja, jika pihak-pihak di Kamboja tidak mempunyai kemauan politik untuk mencapai penyelesaian mereka; (3) pihak-pihak di Kamboja agar menunjukkan rasa tanggung jawab pada pertemuan SNC; (4) akibat perbedaan pendapat di kalangan faksi-faksi yang

bertikai, SNC telah tiga bulan ini belum mengadakan pertemuan (*Antara*, 22-12-1990).

PM Kamboja, Hun Sen, mengatakan pada pertemuan itu bahwa: (1) bangsa Kamboja melalui SNC akan memutuskan di antara mereka sendiri tentang kekuasaan apa saja yang akan didelegasikan kepada PBB; (2) bangsa Kamboja akan mengambil langkah untuk mencegah setiap pemberontakan rezim genocide Pol Pot; (3) peranan PBB dalam penyelesaian masalah Kamboja harus dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Piagam PBB; (4) Kamboja tidak harus ditempatkan di bawah pengawasan negara lain atau organisasi internasional; (5) hanya rakyat Kamboja yang berhak menentukan masa depannya dengan pemilu sebagai kunci solusi politik; (6) tiga prinsip dasar untuk penyelesaian Kamboja adalah: (a) menghargai kemerdekaan dan kedaulatan Kamboja; (b) penghormatan terhadap Piagam PBB; (c) jaminan bahwa rezim genocide Pol Pot tidak akan kembali berkuasa; (7) penerapan gencatan senjata di seluruh wilayah Kamboja, pemilu yang bebas, serta pengakhiran bantuan militer asing (*Kompas*, 22-12-1990).

Pertemuan SNC ini berakhir tanpa persetujuan rencana perdamaian yang diprakarsai PBB. Namun mereka menyatakan bahwa rezim Kamboja dukungan Vietnam dan ketiga kelompok perlawanan setuju untuk segera berkumpul kembali guna membahas cetak biru yang diprakarsai PBB (*Suara Pembaruan*, 23-12-1990).

Para anggota SNC menerima kerangka perdamaian yang diajukan Indonesia dan Perancis sebagai dasar penyelesaian konflik Kamboja. Rancangan penyelesaian menyeluruh (*Comprehensive Political Settlement - CPS*) itu disusun pada tanggal 26 November 1990 oleh Co-Chairman PCC, Indonesia dan Perancis bersama lima anggota tetap DK PBB, terdiri atas tiga rancangan persetujuan utama sebagai dasar penyelesaian konflik yakni: (1) suatu rancangan persetujuan utama yang mencakup unsur-unsur utama dari suatu penyelesaian menyeluruh yang terdiri atas 32 provinsi dengan lima *annex* masing-masing menyangkut mandat yang diusulkan untuk UNTAC (otoritas sementara PBB untuk Kamboja); (2) suatu rancangan persetujuan menyangkut kedaulatan, kemerdekaan, integritas dan keutuhan wilayah, netralitas dan persatuan nasional Kamboja; (3) suatu rancangan deklarasi tentang rehabilitasi dan rekonstruksi Kamboja (*Antara*, 27-12-1990).

Timbangan Buku

Dekat di Mata Tapi Jauh di Hati

Australia dan Indonesia adalah dua tetangga yang aneh. Meski secara geografis berdekatan, namun mereka merasa asing satu sama lain. Buku yang terdiri atas 16 bab ini membahas tentang hubungan kedua negara dari masa ke masa, pengaruh kekuatan-kekuatan besar terhadap kawasan Asia Tenggara, dan juga hubungan kedua negara ditinjau dari aspek sosial, ekonomi, politik dan strategi.

Strange Neighbours: The Australia-Indonesia Relationship oleh Desmond Ball & Helen Wilson. North Sydney: Allen and Unwin Australia Pty. Ltd., 1991, 268 hal.

BUKU tentang "Tetangga-tetangga yang Asing" ini merupakan buku yang patut dibaca oleh para mahasiswa, akademisi, politisi, pengambil keputusan ataupun masyarakat luas. Buku ini merupakan rangkuman beberapa makalah yang diajukan pada Seminar Australia-Indonesia ke-5 yang diadakan di Kampus Universitas Nasional Australia, Canberra, 26-27 Mei 1989. Ada enam isu penting yang dibahas dalam seminar ke-5 tersebut. Pertama, pengaruh kekuatan-kekuatan besar di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik Selatan. Isyu ini dibahas oleh Tony Kevin, staf Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (Chapter 3). Dari pihak Indonesia, Djisman S. Simandjuntak membahas implikasi perubahan terakhir ekonomi dunia terhadap kawasan Asia Tenggara (Chapter 4). Kedua, perkembangan-perkembangan dan

tantangan-tantangan di Papua Nugini khususnya dan Pasifik Selatan pada umumnya yang masing-masing dibahas oleh Jusuf Wanandi dari CSIS (Chapter 5) dan David Hegarty dari ANU (Chapter 6). Ketiga, perkembangan-perkembangan dan tantangan-tantangan di Kamboja, dibahas oleh Gary Klintworth (Chapter 7) dan Sabam Siagian (Chapter 8). Keempat, perkembangan-perkembangan dan tantangan-tantangan di Filipina secara khusus dibahas oleh Reynaldo C. Iletto. Kelima, dimensi-dimensi budaya, politik dan strategi dalam hubungan Indonesia-Australia, masing-masing oleh Goenawan Mohamad, Andrew MacIntyre dan Hasnan Habib. Keenam, isyu-isu tentang perdagangan dan investasi bilateral, masing-masing dibahas oleh Mari Pangestu dan Hal Hill.

Diskusi ini dibuka oleh Senator Gareth Evans, Menlu Australia, yang memberikan latar belakang sejarah hubungan kedua negara, peranan dirinya dalam membina hubungan kedua negara lewat pembentukan Australia-Indonesia Institute, dan juga ha-

rapannya agar seminar tidak hanya membahas perbedaan-perbedaan antara kedua negara melainkan juga persamaan kepentingan serta kerjasama yang erat antara Indonesia-Australia di fora internasional (Chapter 1). Dalam kata pembukaannya Menlu Evans mengatakan, "Tiada dua tetangga di mana pun di dunia ini yang begitu berbeda, dalam hal sejarah, budaya, penduduk, serta tradisi-tradisi politik dan sosial, seperti Australia dan Indonesia" (hal. 1). Perbedaan-perbedaan yang sangat menonjol tersebut tidak jarang menjadi kendala yang cukup kuat terhadap hubungan kedua negara. Seminar di ANU tersebut, seperti juga seminar-seminar sebelumnya yang diadakan di ANU di Universitas Griffith ataupun di CSIS, pada intinya ingin mencari titik temu dan saling pengertian bukan saja di antara dua pemerintahan tapi juga di antara masyarakat dan elite politik Indonesia dan Australia.

Sementara itu, Harry Tjan Silalahi dari CSIS juga membahas arah positif hubungan RI-Australia dalam dua tahun terakhir, 1986-1988 (Chapter 2). Diskusi ini ditutup oleh kesimpulan-kesimpulan yang dibuat oleh Jusuf Wanandi (Chapter 15) dan bekas Dubes Australia di Indonesia, Bill Morrison (Chapter 16).

Di dalam Chapter 3, Tony Kevin secara mendetail membahas perubahan-perubahan lingkungan strategis di kawasan Asia-Pasifik. Di sini ia mengatakan bahwa peran Jepang, Cina dan India sebagai kekuatan-kekuatan regional akan semakin besar di masa mendatang. Dari sudut ekonomi, Muangthai telah membuka jalan untuk menyatukan negara-negara Asia Tenggara di luar ASEAN, seperti Myanmar, Laos dan Kamboja ke dalam sistem ekonomi pasar. Meski saat ini upaya Muangthai tersebut masih untuk kepentingan dirinya, namun di-

harapkan akan tercipta suatu kerjasama ekonomi yang baik di Asia Tenggara. Di sini juga terbuka jalan yang makin lebar bagi Australia dan Indonesia untuk semakin erat bekerjasama demi pembangunan ekonomi dan stabilitas kawasan Asia Tenggara. Sedangkan Djisman S. Simandjuntak di dalam Chapter 4 menekankan perlunya diperluas kerjasama ekonomi regional di Asia Tenggara. Djisman secara luas juga menganalisa terjadinya proses penyesuaian struktural dalam tata ekonomi regional.

Di dalam Chapter 5 dan 6, Jusuf Wanandi dan David Hegarty secara mendetail menganalisa perkembangan terakhir di kawasan Pasifik Selatan. Hegarty secara gamblang mengatakan adanya persaingan kepentingan antara Indonesia dan Australia di kawasan Pasifik Selatan. Hal ini tampak menonjol dalam kasus perkembangan di Fiji sejak kudeta militer 1987 yang dipimpin oleh Kolonel Rabuka, di mana Indonesia tak mendapatkan masalah dalam membina hubungan dengan rezim baru di Fiji, sedangkan Australia tak bisa menggunakan pengaruh kekuatan ekonominya untuk mengubah apa yang terjadi di Fiji. Tampaknya, Indonesia memang ingin memainkan peranan yang besar di kawasan tersebut, seperti tampak dari pendekatan-pendekatannya terhadap Fiji, PNG dan beberapa negara yang berumpun Melanesia. Namun demikian perlu diutarakan bahwa bagaimanapun Indonesia tidak bisa menggantikan peranan besar yang dimainkan Australia di kawasan tersebut karena Indonesia tak memiliki kekuatan ekonomi yang memadai untuk bermain di kawasan Pasifik Selatan. Selain itu, di mata Indonesia, PNG tetap negara terpenting di kawasan Pasifik Selatan.

Jusuf Wanandi juga menggambarkan bagaimana perkembangan hubungan segitiga Indonesia-Australia-PNG. Bill Morrison

tak menerima pendapat Wanandi tentang adanya hubungan segitiga tersebut, karena seolah-olah PNG masih berada di bawah bayang-bayang pengaruh Australia. Apa yang dikatakan Wanandi sebenarnya masuk akal. Sebagai contoh, walau hubungan RI-PNG semakin erat, sebenarnya masih ada kecurigaan PNG terhadap Indonesia sehingga PNG masih perlu payung pertahanan dari Australia. Hal ini tampak secara mencolok dari adanya perjanjian pertahanan antara PNG-Australia yang merupakan bagian dari "Join Declaration of Principles Guiding Relations Between PNG and Australia" pada Desember 1987. Padahal, setahun sebelumnya PNG dan Indonesia telah menandatangani "Treaty of Mutual Respect, Friendship and Co-operation". Saat ini Australia tampaknya juga khawatir akan perkembangan kerjasama pertahanan antara RI-PNG di masa datang, khususnya sejak kunjungan Panglima ABRI Jenderal Try Sutrisno ke Port Moresby tahun lalu. Australia amat khawatir bahwa pengaruhnya di PNG akan berkurang dengan adanya upaya-upaya dari Indonesia. Sebenarnya Australia tak perlu khawatir terhadap upaya positif Indonesia di Pasifik Selatan, khususnya di PNG, karena bagaimanapun hal ini akan menunjang stabilitas di kawasan tersebut.

Wanandi, tampaknya, akan tetap dikenang di PNG sebagai salah seorang arsitek bagi hubungan baik Jakarta-Port Moresby, karena dialah yang mengimplementasikan keinginan bekas Menlu Mochtar Kusumaatmadja untuk mengadakan dialog tetap antara PNG-Indonesia. Adalah Jusuf Wanandi pula yang menganjurkan, lewat Dialog Indonesia-Australia ke-3 di Universitas Griffith, Dialog Indonesia-PNG Pertama di Port Moresby, dan juga artikelnnya di *Far Eastern*

Economic Review di tahun 1984, agar PNG menjadi anggota ASEAN dan agar ASEAN mengundang PNG menjadi anggota resmi (lihat Edward P. Wolfers, *Beyond the Border: Indonesia and Papua New Guinea, South-east Asia and the South Pacific*, Waigani and Sufa, The University of Papua New Guinea Press and The Institute of Pacific Studies, University of South Pacific, 1988, hal. 94 dan 122; *Far Eastern Economic Review*, 16 August 1984, hal. 34). Namun setelah PNG memohon untuk menjadi anggota ASEAN, ternyata akhirnya ditolak oleh ASEAN dengan alasan PNG bukan negara Asia Tenggara dan telah menjadi anggota Forum Pasifik Selatan. Hal ini tampaknya membuat PNG kehilangan muka, walau negeri ini akhirnya menandatangani *Treaty of Amity and Co-operation in Southeast Asia* pada 1989.

Chapter 7 dan 8 membahas perkembangan politik di Kamboja. Baik Sabam Siagian maupun Gary Klinworth amat optimis bahwa penyelesaian politik menyeluruh atas Kamboja akan dicapai pada akhir 1989 atau tak lama setelah itu. Ternyata sampai saat inipun belum terdapat penyelesaian atas masalah tersebut. Satu hal yang menarik, Sabam secara implisit mengungkapkan adanya persaingan antara Indonesia dan Australia dalam penyelesaian masalah Kamboja. Bagi Sabam, Indonesia-lah yang bisa lebih mampu berperan dan bukan Australia. Australia sendiri, sebenarnya, telah memiliki "Buku Merah" (karena bersampul merah) bagi penyelesaian politik Kamboja yang dikeluarkan Menlu Evan tahun lalu.

Chapter 9 tentang perkembangan di Filipina amat menarik ditulis oleh Rey Iletto. Bagian yang menarik tentunya tentang masa depan pangkalan militer AS di Filipina yang akan berakhir September 1991 ini. Masalah

pangkalan ini memperkaitkan antara kepentingan ekonomi, politik dan strategi baik AS maupun Filipina. Tampaknya negara-negara ASEAN masih menginginkan agar pangkalan AS tersebut masih dipertahankan karena negara-negara ini perlu waktu untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan politik, ekonomi dan strategi di kawasan Asia Tenggara, khususnya dalam menghadapi peranan Jepang, Cina dan India sebagai kekuatan regional yang akan berperan di kawasan tersebut. Perkembangan terakhir yang terdengar, Presiden Cory Aquino setuju untuk memperpanjang izin pangkalan militer AS tersebut selama lima tahun, tentunya dengan imbalan milyaran dollar AS.

Sebenarnya ada usulan positif dari bekas Menlu Mochtar Kusumaatmadja agar negara-negara di Asia Tenggara bisa bertanggung jawab atas keamanannya sendiri. Indonesia sejak dulu sangat anti pada pangkalan militer asing. Prof. Mochtar tampaknya juga melihat bahwa dengan ikut sertanya Indonesia dalam kerjasama pertahanan di Asia Tenggara, khususnya antara Indonesia-Malaysia dan Singapura, akan mengurangi ketakutan regional akan kebijakan Indonesia di masa datang, seperti yang terjadi pada masa konfrontasi. Kerjasama pertahanan tiga negara ini akan pula bisa menggantikan *Five Powers Defence Arrangement* antara Inggris, Australia, Selandia Baru, Malaysia dan Singapura (Michael Richardson, "Shifts in the Power Balance," *Asia-Pacific Defence Reporter 1991 Annual Reference Edition*, hal. 37). Namun demikian, kerjasama pertahanan bilateral antar negara-negara ASEAN tampaknya masih tetap yang terbaik, karena kalau diperluas akan mengubah citra ASEAN dari organisasi regional untuk kerjasama ekonomi dan budaya, ke pakta pertahanan.

Chapter-chapter lainnya melulu tentang hubungan Indonesia-Australia. Seperti kita ketahui, hubungan Australia-Indonesia dalam kurun waktu hampir setengah abad ini telah mengalami pasang naik dan pasang surut. Beberapa pembawa makalah, seperti penyunting Desmond Ball, Menlu Gareth Evans, Goenawan Mohamad, Andrew MacIntyre serta Hasnan Habib membahas masalah ini di dalam seminar tersebut. Pasang naik hubungan kedua negara amat mencolok pada masa revolusi Kemerdekaan Indonesia di mana para buruh radikal Australia membantu perjuangan para eks-Digulis di Australia dalam menyuarakan kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu secara kebetulan Australia di bawah pemerintahan Perdana Menteri Ben Chifley dari Partai Buruh yang belakangan juga membantu perjuangan Indonesia khususnya lewat ikut sertanya Australia di dalam komisi tiga negara. Kisah perjuangan para eks-Digulis ini pernah diulas oleh almarhum Mohamad Bondan dalam bukunya yang berjudul *Genderang Api Kemerdekaan di Luar Negeri*.

Bulan madu hubungan kedua negara ternyata amat singkat. Pergantian pemerintahan dari Chifley ke Menzies dari koalisi Partai Liberal-National di akhir tahun 1949, ternyata juga membawa perubahan yang drastis dalam kebijakan luar negeri Australia terhadap Indonesia. Australia saat itu membantu Belanda dalam mempertahankan Irian Barat, bahkan kedua negara bermaksud untuk menggabungkan Irian Barat dan Irian Timur (PNG sekarang) menjadi satu pemerintahan sendiri. Perubahan politik luar negeri Amerika Serikat dari netralitas pasif ke politik mediasi dalam masalah Irian Barat, akhirnya juga mengubah sikap Australia terhadap masalah Irian Barat ke arah yang positif.

Sebagai negara yang terletak paling selatan dan terpencil, Australia sejak lama memang takut akan ancaman dari utara. Di akhir abad 19 misalnya, Australia begitu takut ketika Jerman mengambil paruh utara bagian timur pulau New Guinea. Hal ini menyebabkan Australia mendesak Inggris untuk juga mengambil paruh selatan dari bagian timur pulau tersebut, sedangkan Belanda telah menduduki seluruh bagian barat New Guinea yang kini menjadi Irian Jaya. Sejarah ketakutan Australia ini, dari sudut strategis, secara singkat dan padat dibahas oleh Hasan Habib. Dasar dari politik luar negeri Australia masih berpijak pada letak geografisnya dan upayanya untuk mempertahankan warisan Inggris. Sejak berakhirnya Perang Dunia II, Australia amat tergantung pada payung pertahanan Amerika Serikat dan bukan lagi dari Inggris. Siapapun yang memerintah di Australia, pemerintah Buruh ataupun koalisi Liberal-Nasional, hubungan pertahanan dengan Amerika akan tetap dipertahankan.

Pasang surut hubungan kedua negara berlangsung sampai pertengahan 1960an, khususnya saat Indonesia menjalankan politik konfrontasi terhadap pembentukan negara federasi Malaysia. Saat itu Australia membantu Inggris dalam mempertahankan wilayah Kalimantan Utara. Walau tidak sampai menjurus ke pertempuran besar, tentara Australia sempat berhadapan dengan tentara atau sukarelawan Indonesia di Kalimantan Utara.

Hubungan kedua negara mengalami pasang naik lagi ketika Jenderal Soeharto naik ke panggung politik Indonesia setelah gagalnya PKI dalam peristiwa 30 September 1965. Adalah Australia, bersama Jepang dan Belanda, yang berperan dalam pembentukan IGGI untuk membantu pembangunan

ekonomi Indonesia.

Lagi-lagi, hubungan tersebut memburuk karena sebagian besar rakyat Australia sangat shock ketika integrasi Timor Timur dengan Indonesia, apalagi sejak terbunuhnya lima wartawan Australia di Balibo, Timor Timur. Dan hubungan tersebut memburuk kembali ketika David Jenkins menu-runkan artikel tentang bisnis keluarga Cendana di *Sydney Morning Herald*, April 1986.

Selama ini kita hanya mengetahui bahwa perbedaan budaya yang mencolok antara orang Australia dan Indonesia adalah salah satu penyebab ketidakeratan hubungan kedua negara. Hal ini dibantah oleh Goenawan Mohamad dan Andrew MacIntyre. Goenawan, yang adalah pemimpin redaksi Tempo, mengungkapkan bahwa orang Indonesia, baik yang di pemerintahan maupun yang di luar, sejak berakhirnya revolusi kemerdekaan merasa dirinya unik. Karena uniknya sampai-sampai Soekarno ingin membentuk suatu demokrasi ala Indonesia yang lain daripada yang terdapat di negara-negara barat. Pergantian pemerintahan dari Soekarno ke Soeharto juga tidak mengubah citra diri Indonesia yang unik ini. Hanya saja, demokrasi ala Indonesia itu berubah nama dari "Demokrasi Terpimpin" ke "Demokrasi Pancasila". Tapi pesannya adalah sama, Indonesia lain daripada "barat". Orang Barat tidak bisa menilai Indonesia atas standar yang berlaku di Barat (hal. 143). Inilah untuk pertama kalinya orang Indonesia berani mengungkapkan citra diri dan persepsi orang Indonesia dipandang dari kacamata orang Indonesia sendiri. Pendapat Goenawan tersebut sebenarnya telah lama terpendam di benak beberapa pengamat politik Indonesia, namun kurang berani untuk mengungkapkannya. Makalah Goenawan dinilai "Excellent" bukan saja oleh Jusuf

Wanandi dan Bill Morrison, tapi juga dari para pengamat Indonesia orang Indonesia maupun Australia.

Citra diri orang Indonesia ini mungkin perlu ditambahkan. Selama ini kita selalu merasa bahwa Indonesia berada di posisi yang penting, di antara dua benua dan dua samudera. Padahal, posisi silang tersebut tak begitu penting di mata negara super kuat seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet, karena Indonesia hanya menghubungkan benua Asia dengan benua Australia yang terpencil di Selatan. Di Asia Tenggara sendiri, bukan Indonesia yang penting di mata AS, melainkan Filipina, karena Filipina adalah salah satu mata rantai kepentingan strategis AS di Asia Tenggara dan Pasifik Selatan, selain Jepang dan Australia.

Citra diri yang unik ini menyebabkan kadang-kadang Indonesia merasa lebih penting daripada Australia. Kalau Australia mau membina hubungan baik, maka harus mengikuti gaya Indonesia. Ini juga menyangkut pers Australia dan pemberitaannya tentang Indonesia. Itu sebabnya, menurut Andrew, kadang-kadang tak terjadi peresesuaian antara pemerintah Indonesia dengan pers Australia di satu pihak dan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Australia di pihak yang lain (146-150). Pers Australia, sesuai ukuran demokrasi liberal, bebas memberitakan apa saja, termasuk yang untuk pemerintah Indonesia dianggap tabu. Tidak jarang pemerintah Indonesia mendesak Australia agar "menyesuaikan pers-nya" sesuai dengan standar Indonesia, yang tentunya tak bisa diterima oleh Australia. Sikap Australia yang tak mau didesak-desak ini amat menonjol pada masa pemerintahan Bob Hawke, khususnya antara tahun 1986-1987, setelah terjadinya "Peristiwa Jenkins". Itu sebabnya, Indone-

sia tak bisa membendung pemberitaan Radio Australia tentang Indonesia dalam bahasa Indonesia dan juga pemberitaan surat kabar Australia tentang situasi Indonesia.

Kerjasama ekonomi, yang dibahas dalam Chapter 13 dan 14, tampaknya merupakan suatu hal yang diharapkan semakin berkembang di masa datang. Selama ini perdagangan dan investasi di kedua negara tampaknya masih sangat terbatas. Namun demikian upaya kedua negara untuk meningkatkan kerjasama dalam memperjuangkan terbukanya pasar internasional tampaknya suatu hal yang patut dibanggakan. Pengetahuan masing-masing negara tentang kemampuan ekonomi satu sama lain juga masih terbatas. Tapi ada satu kecenderungan positif, yakni adanya kerjasama yang semakin meningkat antara ekonom ANU dan UI khususnya dan ANU dengan CSIS pada umumnya. Adalah suatu kenyataan bahwa selama ini ada pertukaran informasi, lewat jurnal ataupun seminar, antara para ekonom, ahli demografi dan ahli politik kedua negara.

Isi buku ini pada dasarnya ditulis oleh orang-orang yang menginginkan adanya perbaikan positif dalam hubungan RI-Australia. Mereka semua kadang-kadang bertanya, mengapa Indonesia dan Australia yang berdekatan ini kok asing satu sama lain. Isi buku ini mungkin akan lebih berwarna, kalau orang-orang yang selama ini suka memprotes Indonesia juga menyumbangkan makalahnya. Namun demikian, tidak jarang terjadi, kalau ada seminar semacam ini, ada pula seminar tandingan seperti yang kadang-kadang diorganisasi oleh *Inside-Indonesia*.

Para Penulis

- **KARTASASMITA, Ginandjar,**
Institut Teknologi Bandung (1959-1960), Sarjana Kimia Teknik pada Tokyo University for Agriculture and Technology Chemical Engineering (1960-1965), dan Sarjana Administrasi Negara pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LAN (1970-1980). Mengikuti pelbagai pendidikan militer sejak tahun 1966; yang terakhir adalah Sekolah Komando Kesatuan Angkatan Udara (1974). Memegang pelbagai jabatan penting di lingkungan Sekretariat Negara (1968-1983). Menteri Muda Urusan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (1983). Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (1985). Sejak tahun 1988 sebagai Menteri Pertambangan dan Energi.
- **MAGENDZO, Salomon,**
Peneliti Senior dari Program Riset Interdisipliner dalam Bidang Pendidikan (PIIE) di Santiago, Chili. Perhatiannya meliputi pendidikan rakyat, teori-teori yang mendasarinya, dan masalah pemuda putus sekolah. Hasil pemikirannya diterbitkan dalam buku *Transferencia y Apropiacion en Proyectos de Educacion Popular; Identidad del Educador Popular, Seis Relatos de Vida* (Transference and Appropriation in Popular Education Projects: Identity of the Community-Based Educator, Six Life Stories) dan (bersama dengan I. Egana) *Oportunidades Educativas y Laborales para los Egresados de Octavo Grado de Educacion Basica de los Sectores Populares* (Educational and Employment Opportunities for Eight Grade Graduates of Basic Education from Popular Sectors) 1988, laporan untuk FONDECYT.
- **PELLY, Usman,**
Sarjana IKIP Medan (1969), Master of Arts pada University of Illinois, Urbana, USA (1980), dan mendapat Ph.D. pada universitas yang sama tahun 1983. Sekarang menjadi Guru Besar di IKIP Medan, Fisipol USU, KPK Pasca Sarjana IPB-USU. Kepala Pusat Studi Kependudukan dan Lingkungan Hidup IKIP Medan; Kepala Lembaga Penelitian IKIP Medan (1975-1976). Pembantu Rektor I, IKIP Medan (1976 sampai sekarang).
- **PRANARKA, A.M.W.,**
Memperoleh gelar Sarjana Filsafat dari Athenaao, Poona, India (1965); Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung (1969) dan gelar Doktor dalam Ilmu Hukum, dari universitas yang sama tahun 1984. Sekarang Anggota Dewan Direktur CSIS dan Ketua Departemen Politik, CSIS Jakarta dan Ketua Konsorsium Lembaga Pengkajian Kebudayaan Sarjanawiyata, Tamansiswa Yogyakarta.
- **RACHMAN, Ali M.A.,**
Sarjana Pertanian pada Institut Pertanian Bogor (1972), Master of Arts bidang Anthropologi pada University of Malaya, Malaysia (1980) dan mendapat gelar "Doctor of Philosophy" pada universitas yang sama tahun 1984. Dosen Fakultas Pasca Sarjana IPB dan Universitas Jambi. Aktif melakukan pelbagai penelitian terutama bidang *Anthropology and Human Ecology*, sejak tahun 1969.
- **RAHARDJO, Satjipto,**
Sarjana Hukum Universitas Indonesia (1960), Doktor bidang hukum pada Universitas Diponegoro (1979) dan sebagai "Visiting Scholar at the University of California, Berkeley, USA" (1972-1973). Guru Besar Hukum pada Universitas Diponegoro (Semarang), Universitas Gadjamada (Yogyakarta), Universitas Indonesia (Jakarta), Pendidikan Tinggi Ilmu Kepolisian (Jakarta), Ketua Konsorsium Ilmu Hukum, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1986-1989), Ketua Pusat Studi Kepolisian, Universitas Diponegoro dan sebagai Anggota Dewan Riset Nasional.